

**Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa**

(Studi Kasus Kabupaten Pati)

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Menyelesaikan

Drajat Sarjana S1



Disusun oleh :

Indah Syafa'atul Ula

Nim : 31401900080

Universitas Islam Sultan Agung

Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi

Semarang

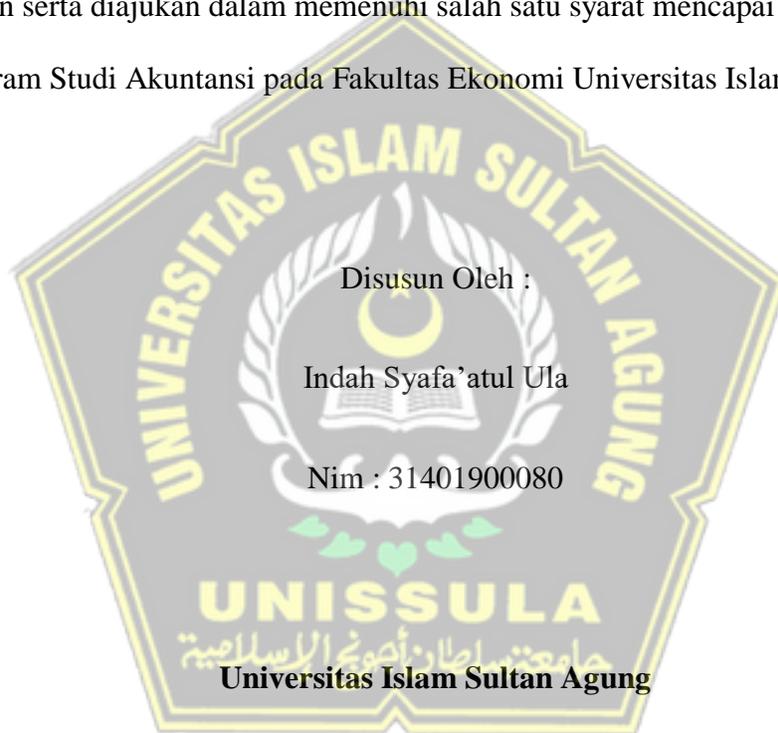
2023

Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Disusun serta diajukan dalam memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana
S1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung



Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi

Semarang

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati)**

Disusun Oleh :

Indah Syafa'atul Ula

Nim : 31401900080

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya diajukan kepada panitia sidang
ujian dalam penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

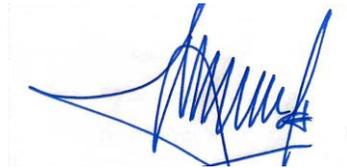
Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, Juni 2023

UNISSULA

جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

Pembimbing



Dedi Rusdi, S.E., M.Si.,Akt.,CA. CRP.

NIDN: 0610107001

HALAMAN PERSETUJUAN

**“Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati)”**

Disusun Oleh :

Indah Syafa'atul Ula

Nim : 31401900080

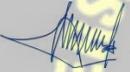
Telah diajukan didepan penguji tanggal

, Juni 2023

Susunan Penguji

Pembimbing

Penguji


Dedi Rusdi, S.E., M.Si.,Akt.,CA. CRP.
NIDN: 0610107001


Dr. Osmad Muthaher, Msi.
NIDN : 0711046401

Penguji


Dr. E. Drs. Crisna Suhendi, SE.,MBA,AK.
NIDN : 0603046301

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si.,AK.,CA
NIDN : 0611088001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Indah Syafa'atul Ula

Nim : 31401900080

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Akuntansi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa pengajuan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Digitalisasi, Transparansi, dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati)”** merupakan benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikasi orang lain. Pendapat ahli dalam penelitian ini telah dikutip dengan dasar kode etik ilmiah penelitian. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiasi maka saya bersedia menerima konsekuensi dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juni 2023

Yang Menyatakan



Indah Syafa'atul Ula

Nim : 31401900080

DAFTAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Syafa'atul Ula

Nim : 31401900080

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan penyerahan karya ilmiah berupa Tugas Akhir /Skripsi / Tesis /Disertasi * dengan judul : **“Pengaruh Digitalisasi, Transparansi, dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati)”** dan menyatakan setuju menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak bebas Royalti Non-ekslusi untuk disimpan, dialihkan media, dikelola dan publikasi untuk kepentingan akademis sesuai kode akademik penelitian dengan tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Semarang ,Juni 2023

Yang Menyatakan,



Indah Syafa'atul Ula

Nim : 31401900080

*coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kamu harus menciptakannya. Ketika kesempatan telah datang tapi kamu gagal setidaknya kamu telah berproses menuju kesuksesan. Bekerja keras karena kesuksesan harus diperjuangkan.”

-Indah Syafa'atul Ula-

“Kamu adalah peran utama dalam hidupmu.”

-Kim Doyoung-

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, coba sesuatu yang lain, dan terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.”

-Najwa Shihab-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Bapak dan Ibu tersayang tercinta
- Seluruh keluarga
- Sahabat serta teman tersayang



ABSTRACT

Village funds are budgets given by the central government to village governments to manage, develop and make their regions more developed. Accountability is a form of control over public sector organizations so that it is organizational as a basis for providing explanations from internal and external parties who have an interest. The large amount of village fund budget that is disbursed requires good, correct and transparent village fund management so that it is appropriate and on target. Based on *IWC (Indonesia Corruption Watch)* there are several sectors where there is a lot of abuse, one of the most is the management of village funds, thus the need for accountability in managing village funds. In this study the aims were to determine the effect of digitalization on village fund management, how to use the *siskeudes* application, to find out the disclosure or transparency of each village and the competencies they have and the competencies that support village fund management. The population in this study chose Pati district, Tayu subdistrict, by collecting data directly by distributing questionnaires. The saturated sampling technique method yielded 82 respondents using multiple linear regression analysis techniques using the *IBM SPSS Statistics 25* program. So from the results of this study it can be seen that Digitalization, Transparency and HR competence have a significant effect on village fund management so that it is accountable.

Keywords: Village Fund Management Accountability, Digitalization, Transparency and HR Competence

ABSTRAK

Dana desa merupakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah desa untuk mengelola, mengembangkan serta menjadikan daerahnya semakin maju. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pengendalian organisasi sektor publik sehingga organisasional sebagai landasan untuk memberikan penjelasan dari pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan. Banyaknya anggaran dana desa yang disalurkan perlu adanya pengelolaan dana desa yang baik, benar serta transparan sehingga sesuai dan tepat sasaran. Berdasarkan *IWC (Indonesia Corruption Watch)* ada beberapa sektor yang banyak terjadi penyalahgunaan salah satu terbanyak ialah pengelolaan dana desa, dengan demikian perlunya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi terhadap pengelolaan dana desa, bagaimana penggunaan aplikasi siskeudes, mengetahui pengungkapan atau transparansi tiap desa dan kompetensi yang dimiliki serta kompetensi yang mendukung pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian memilih kabupaten Pati kecamatan Tayu dengan pengambilan data secara langsung penyebaran kuesioner. Metode teknik sampling jenuh menghasilkan 82 responden dengan teknik analisa regresi linier berganda menggunakan program *IBM SPSS Statistic 25*. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Digitalisasi, Transparansi dan kompetensi SDM berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa sehingga akuntabel.

Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Digitalisasi, Transparansi dan Kompetensi SDM

INTISARI

Akuntabilitas ialah bentuk kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban kinerja serta tindakan. Sedangkan anggaran dana desa merupakan saluran anggaran yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa dengan pemerintah desa sebagai tangan kanannya. Banyaknya dana alokasi tiap tahunnya tentu harus diiringi dengan realisasi yang tepat sasaran serta pertanggungjawaban. Seperti dijelaskan dalam hadist Rasulullah sallawahu Alaihi Wasallam yang memiliki makna bahwasannya “*Setiap kalian ialah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.*”. Menciptakan *Good Governance* tentu sangat penting bagi suatu instansi pemerintahan dalam pengelolaan dana desa. Adanya perkembangan digital secara cepat tentu akan mendorong kinerja pemerintahan sehingga lebih baik dan terstruktur. Dengan adanya aplikasi siskeudes, tentu memudahkan bentuk akuntabilitas pemerintahan dalam mengelola dana desa. Transparansi merupakan bentuk kebebasan atau bentuk pertanggungjawaban secara menyeluruh pada publik sehubungan dengan kepentingan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Dengan bentuk publikasi yang lengkap pada masyarakat tentu akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan dana desa secara aktif. Digitalisasi serta bentuk transparansi haruslah diiringi dengan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung. Tingkat pendidikan serta pelatihan aparat tentunya akan menjadi faktor yang akan menentukan akuntabilitas sehingga lebih baik.

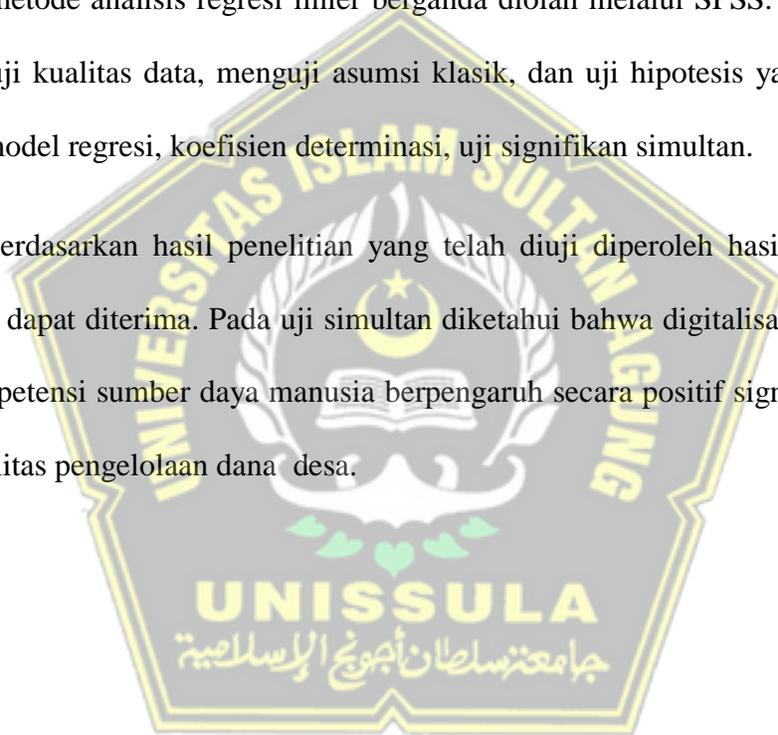
Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyatakan bahwa ada pengaruh secara positif digitalisasi, transparansi serta kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hendaris (2021) menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Windyastuti,dkk menyatakan bahwa transparansi berhubungan secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Windyastuti et al. 2019). Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ardianti 2017), Penelitian yang dilaksanakan oleh Suryani (2021) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa masih perlu adanya peningkatan kompetensi SDM.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dapat diambil rumusan masalah : Bagaimana pengaruh digitalisasi, transparansi serta kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa apakah digitalisasi, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian menggunakan tinjauan pustaka yang menghasilkan tiga hipotesis : digitalisasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa, transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Populasi dalam penelitian ini ialah aparatur perangkat pemerintahan desa. Yang terdiri dari 21 desa dengan terdapat 82 sampel yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik sampling jenuh (sensus) merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian. Dengan menggunakan data primer melakukan penyebaran kuesioner secara langsung pada aparat pemerintah yang bertugas di desa. Dalam pengujian data dengan metode analisis regresi linier berganda diolah melalui SPSS. Teknik analisis dengan uji kualitas data, menguji asumsi klasik, dan uji hipotesis yang meliputi uji analisa model regresi, koefisien determinasi, uji signifikan simultan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji diperoleh hasil bahwa semua hipotesis dapat diterima. Pada uji simultan diketahui bahwa digitalisasi, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memlimpahkan hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian dengan judul **Pengaruh Digitaisasi, Transparansi, dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati)** disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan segala hormat serta kerendahan hati, peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat serta doa, kepada :

1. Bapak Dedi Rusdi, S.E., M.Si.,Akt.,CA.CRP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya serta tenaga dengan penuh kesabaran dalam membimbing. Memberikan arahan, kritik, saran dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak,CA selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak dan Ibuk Tersayang, Bapak Warsidi dan Ibu Siti Rukanah yang selalu selalu mendoakan serta mendukung dari semua aspek baik secara moral maupun materiil.
5. Mbah saya tercinta, Mbah Roto dan Mbah Sulasni serta Mbah Sami yang senantiasa mendoakan cucu tunggal perempuan kesayangannya ini.
6. Bapak Imam Rifai, S.STP, M.M selaku Pak Camat yang telah membantu mempermudah serta mendukung terlaksananya penelitian ini.
7. Seluruh Kepala Desa beserta jajarannya yang telah bersedia membantu proses pengambilan data dan bersedia mengisi kuesioner.
8. Sahabat saya Ayu Dyah Wafiasshofa, N.F, S.Ak. yang membantu serta menemani saya dalam segala hal, menemani berkeliling desa mencari data dan membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.
9. Sahabat saya Gielda Ayu Ratu Balqis yang selalu mau untuk saya repotkan. Menyediakan saya tempat untuk mengerjakan skripsi serta teman seperjuangan dalam bergadang. Semangat Skripsi Kita Biasa Lulus Bareng.
10. Seruruh penghuni kos Bu erna yang baik hati selalu mendukung saya dan memberikan semangat, terutama Mba Rita, Mba Putri Okcil, Patricia, Rilis dan Hasna.
11. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa menemani dan berjuang bersama dan Kakak-kakakku yang memberikan doa serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Seluruh civitas akademisi fakultas ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu serta mendidik sehingga mengarahkan serta memberikan motivasi bagi penulis. Staf Karyawan dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi yang telah membantu mempermudah urusan administrasi.

Semoga seluruh bimbingan, bantuan dan dukungan yang diberikan kepada peneliti mendapat balasan pahala yang berlipat ganda nantinya dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan baik dari sisi akademik maupun non akademik serta memberikan manfaat bagi yang membacanya.



Semarang, Juni 2023

Peneliti

Indah Syafa'atul Ula
31401900080

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
DAFTAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
INTISARI	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Pertanyaan Penelitian	14
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	15
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 <i>Good Corporate Governance</i>	16
2.2 Akuntabilitas Dana Desa	19
2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	20
2.4 Digitalisasi	22

2.5	Transparansi	23
2.6	Kompetensi Perangkat Desa.....	24
2.7	Pengelolaan Dana Desa	25
2.8	Penelitian Terdahulu	26
2.9.1	Pengaruh Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	31
2.9.2	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	32
2.9.3	Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	33
2.10	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Populasi dan Sampel	37
3.2.1	Populasi.....	37
3.2.2	Sample.....	37
3.3	Jenis dan Sumber Data	38
3.4	Metode Pengumpulan Data	38
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	39
3.5.1	Variabel Dependen (Y)	40
3.5.2	Variabel Independen (X)	40
3.5.3	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	40
3.6	Teknik Analisis	41
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	41
3.6.2	Uji Kualitas Data.....	42
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	43
3.6.4	Pengujian Hipotesis	45
3.6.4.1	Analisis Model Regresi	45
3.6.4.2	Koefisien Determinasi (R ²).....	46
3.6.4.3	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	47
3.6.4.4	Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	49
4.1.1 Hasil Penyebaran Kuesioner	49
4.1.2 Karakteristik Responden	51
4.2 Analisis Data	53
4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel	53
4.2.1.1 Deskripsi Variabel Digitalisasi	56
4.2.1.2 Deskripsi Variabel Tranparansi	56
4.2.1.3 Deskripsi Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	57
4.2.1.4 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	58
4.3 Hasil Uji Kualitas Data	59
4.3.1 Hasil Uji Validitas Data	59
4.3.1 Hasil Uji Realibilitas	60
4.4 Uji Asumsi Klasik	61
4.4.1 Hasil Uji Normalitas	61
4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	62
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastitas	63
4.5 Analisis Regresi Linear Berganda	64
4.6 Pengujian Hipotesis	65
4.6.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	65
4.6.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	66
4.6.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)	67
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	68
4.7.1 Pengaruh Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	68
4.7.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	70
4.7.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	71
BAB V PENUTUPAN	72
5.1 Kesimpulan	72

5.2 Keterbatasan.....	73
5.3 Saran	73
5.3.1 Bagi Akademik.....	73
5.3.2 Bagi Aparat Pemerintah Desa.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	40
Tabel 4. 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	49
Tabel 4. 2 Data Sample Penelitian	50
Tabel 4. 3 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	51
Tabel 4. 4 Karakteristik Usia Responden.....	51
Tabel 4. 5 Karakteristik responden berdasarkan rentan waktu jabatan.....	52
Tabel 4. 6 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan	52
Tabel 4. 7 Jabatan.....	53
Tabel 4. 8 Skala Likert	54
Tabel 4. 9 Descriptif Statistics	55
Tabel 4. 10 Deskripsi variabel digitalisasi	56
Tabel 4. 11 Deskripsi variabel transparansi	57
Tabel 4. 12 Deskripsi variabel Kompetensi SDM	58
Tabel 4. 13 Deskripsi variabel akuntabilitas dana desa	58
Tabel 4. 14 Uji Vaiditas Data.....	59
Tabel 4. 15 Uji Realibilitas	61
Tabel 4. 16 Hasil Uji Normatif	61
Tabel 4. 17 Uji Multikolinieritas.....	62
Tabel 4. 18 Uji Heteroskedastitas	63
Tabel 4. 19 Model Persamaan Regresi.....	64
Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	65
Tabel 4. 21 Hasil Uji F.....	66
Tabel 4. 22 Uji Parsial (t).....	67

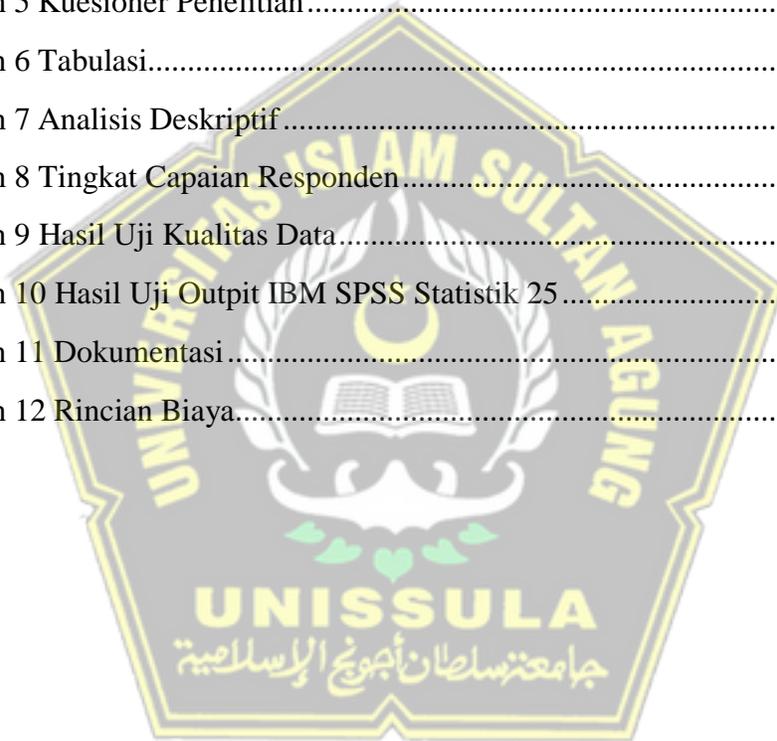
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penyaluran Anggaran Dana Desa.....	2
Gambar 1. 2 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menurut BPS	5
Gambar 1. 3 Indonesia Corruption Watch (ICW).....	7
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoriti	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Universitas Islam Sultan Agung kepada Kabupaten Pati Kecamatan Tayu	82
Lampiran 2 Blangko Pembuatan Surat Pengantar Skripsi dari Fakultas	83
Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian dari Kecamatan.....	84
Lampiran 4 Tanda Ijin Pengambilan Data Dari Desa	85
Lampiran 5 Kuesioner Penelitian.....	88
Lampiran 6 Tabulasi.....	101
Lampiran 7 Analisis Deskriptif.....	111
Lampiran 8 Tingkat Capaian Responden.....	111
Lampiran 9 Hasil Uji Kualitas Data.....	113
Lampiran 10 Hasil Uji Output IBM SPSS Statistik 25.....	122
Lampiran 11 Dokumentasi.....	125
Lampiran 12 Rincian Biaya.....	126



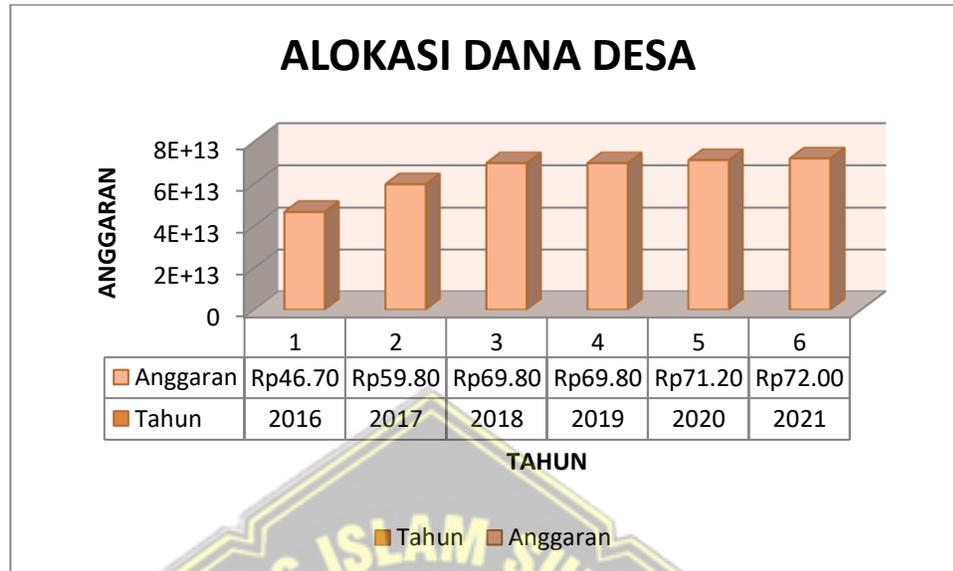
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa ialah sistem kebijakan di terapkan di Indonesia sebagai kesatuan dalam masyarakat dengan batasan wilayah. Undang-undang 45' menjelaskan bahwa Desa merupakan suatu kebijakan Indonesia, yang menggambarkan hubungan antar negara, desa dan masyarakat. Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki hubungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat diberikan wewenang untuk mengelola dan mengatur suatu wilayah dalam melestarikan kebudayaan masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur sereta partisipasi dalam menggali potensi desa untuk mendorong kemajuan pemerintahan desa aktif, efektif, transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi (Nisya 2017). Berdasarkan Undang-undang No. 06 2014 desa yaitu satu kesatuan masyarakat berbadan hukum yang memiliki batas wilayah wenang-wenang dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fabiana, 2019).

Dilansir dari [Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id) oleh Eko Supriyanto, semenjak dilaksanakannya alokasi pendana pada desa sejak tahun 2015, pemerintah sudah menyalurkan dana Rp. 468,9 triliun hingga tahun 2022 (<https://djpb.kemenkeu.go.id/>).



Gambar 1. 1 Penyaluran Anggaran Dana Desa

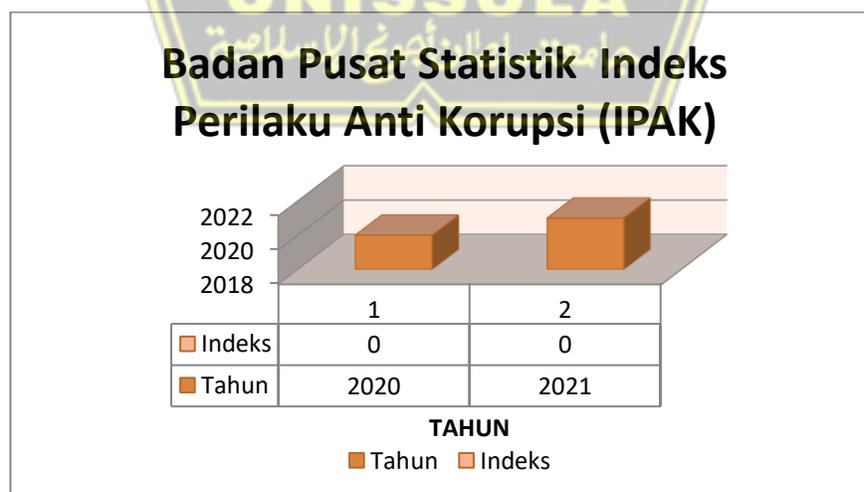
Angka tersebut semakin meningkat seiring berjalannya tahun ke tahun (<https://kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita>). Dana alokasi ditransfer untuk 434 pemerintah daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa 74 ribu pemerintahan desa. Agar terwujudnya pertanggungjawaban yang baik pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 2014). Dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik, peningkatan ini mampu terjadi dengan semakin diperketatnya penerapan prinsip good governance yang didalamnya mengandung akuntabilitas sebagai landasan penting.

Akuntabilitas yaitu suatu bentuk pengendalian organisasi sektor publik sehingga organisasional sebagai landasan untuk memberikan penjelasan dari pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan. Akuntabilitas termasuk faktor penting dalam pemerintahan dengan mewujudkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap segala kegiatan yang dirancang dan dikelola oleh pemerintahan. Akuntabilitas ialah bentuk kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dalam menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau badan hukum pimpinan suatu organisasi pada pihak yang memiliki hak serta wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Naryanti 2022). Seperti dijelaskan dalam hadist Rasulullah sallawahu Alaihi Wasallam yang memiliki makna bahwasannya *“Setiap kalian ialah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam ialah ia pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita merupakan pemimpin bagi rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia akan pula dimintai pertanggungjawabannya. Sesungguhnya setiap hal kalian merupakan pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawabannya”*(<https://risalahmuslim.id>).

Tingkat akuntabilitas dan transparansi pada pemerintahan didesa bisa digolongkan relatif rendah, sehingga potensi terjadinya kecurangan dapat dilihat dari aparatur desa dari mulai manipulatif data, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Peraturan pemerintah No.47 2015 menjelaskan dana yang disalurkan untuk seluruh

desa yang ada di Indonesia bersumber dari APBN (Suparyanto 2020). Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) kepala desa berperan penting dalam memimpin aparat desa untuk melaksanakan serta mempertanggungjawabkan alokasi penggunaan dana desa. Dijelaskan dalam UUD No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 75 ayat (2), berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa (Fabiana 2019) (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2014). Mutu dan kualitas dari laporan keuangan menunjukkan kinerja yang dilakukan instansi pemerintahan, adanya penyimpangan hingga fraud bisa menjurus pada terjadinya tindakan kasus korupsi pada instansi yang bersangkutan.

Menurut Badan Pusat Statistik Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 hingga 5 (Rani 2020).



Gambar 1. 2 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menurut BPS

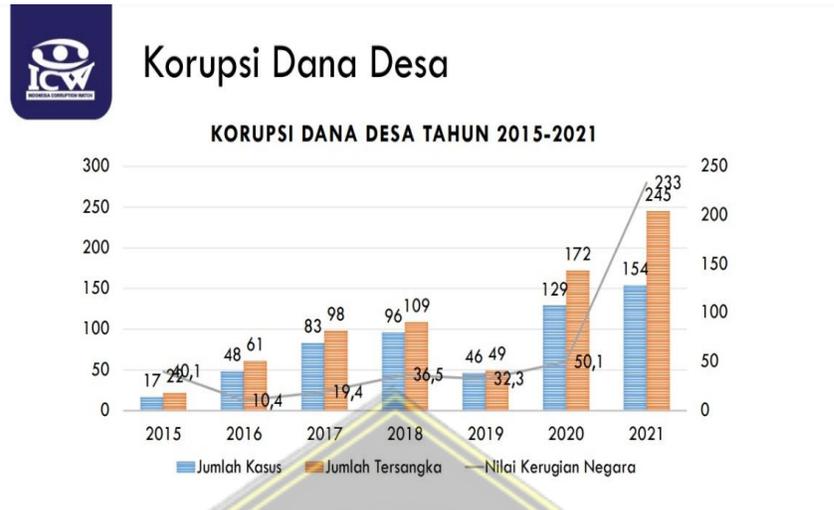
Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 102 negara dengan tingkat korupsi di dunia. Terciptanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan visi strategis dalam organisasi sektor publik tidak terlepas dari peran penting *good governance*. Perkembangan teknologi yang terjadi pada Indonesia saat ini menjadi sangat pesat akibat dari covid-19. salah satu dampak positif dari pandemi adalah percepatan peralihan teknologi yang mewajibkan setiap orang mengupgrade kemampuan diri dalam penggunaan teknologi, tak terkecuali dalam pemerintahan. Perputaran yang cepat ini semakin mendukung terciptanya *good governance* dalam penyajian pelaporan pemerintahan. Aplikasi sistem keuangan pemerintahan desa (Siskeudes) menjadi akomodir dalam regulasi keuangan desa. Hal ini tentu memberikan rasa nyaman dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Haryati 2017).

Transparansi adalah bentuk keterbukaan serta kejujuran pemerintah dalam penyelenggaraan semua keseluruhan kegiatan dalam program pemerintahan. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan penyediaan informasi serta memudahkan informasi secara akurat (Mardiasmo2 2018). Transparansi dana desa meliputi keterbukaan informasi tentang perencanaan program pengembangan desa, pelaksanaan program hingga pertanggungjawaban. Efektifitas akuntabilitas

tergantung terhadap akses rakyat pada laporan keuangan yang secara mudah dapat diakses, dibaca serta dipahami (Fauzani 2018).

Hal yang tidak kalah penting dalam sistem pengelolaan dana desa yaitu kompetensi organisasi pemerintahan desa. Aparatur desa yang profesional bisa mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola dana desa (Umaira 2019). Dikatakan penting karena keberhasilan dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai kompetensi atau ketrampilan atau keahlian dalam penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa. Kompetensi berupa sifat, sistem penilaian, sikap, pengetahuan dan ketrampilan (Puspa 2020). Menurut BKN (Badan Kepegawaian Negara) No 46 A Tahun 2003 kompetensi adalah keahlian dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri berupa pengetahuan, keterampilan, serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya hingga pegawai tersebut dapat melakukan kewajiban secara efisien, efektif dan profesional (Haryanto 2003).

Sepanjang 2021 menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* korupsi tertinggi pada sektor anggaran dana desa sebesar Rp. 233 miliar dengan 154 kasus yang terjadi (<https://dataindonesia.id>)(Dini 2022).



Gambar 1.3 Indonesia Corruption Watch (ICW)

Kabupaten Pati merupakan sebuah wilayah di utara pulau jawa yang berbatasan dengan Kota Kudus dan Kota Jepara. Kabupaten dengan 21 kecamatan dan 401 desa. Memiliki luas wilayah 1.489,19 km². Beberapa kasus yang dilansir dari beberapa sumber melatarbelakangi penelitian ini diantaranya:

Tabel 1.1 Data Penyelewengan Kab. Pati

Kasus	Sumber	Tanggal
Kades Sambirejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati berinisial S menyelewengkan dana desa Rp. 500 juta	<i>murianews.com</i>	2022 Maret 15
Kades Banjarsari Kecamatan Gabus Kabupaten Pati melakukan penyalahgunaan dana desa Rp. 600 juta	<i>beritajateng.id</i>	2022 Maret 30

Kades Kedumulyo Kabupaten Pati Arief Setyo Handono menyelewengkan dana desa Rp. 107 juta	<i>jateng.antarnews.com</i>	2022 Maret 20
Kades Bulumanis Lor Pramono menyelewengkan dana JUT (Jalan Usaha Tani) sebesar Rp. 200 juta	<i>radarkudus.jawatengah.jawapos.com</i>	2021 November 2021

Berdasarkan fenomena tersebut menduga bahwa masalah akuntabilitas pengelolaan dan desa di Kabupaten Pati dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu transparansi, kompetensi serta digitalisasi aparatur perangkat pemerintahan desa yang masih lemah dan belum memadai. Namun belum terbukti secara empiris maka penelitian ini mencoba meneliti dengan populasi adalah pejabat struktural perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, bagian fungsi keuangan, bagian kemasyarakatan, bagian kesekretariatan pada Organisasi Perangkat Desa (OPD).

Keberhasilan pengelolaan dana desa dengan pertanggungjawaban dalam pengendalian semua pelaksanaan kegiatan. Tolak ukur serta standar laporan keuangan pemerintahan daerah bukan hanya sebagai dasar penentu kebijakan namun juga sebagai bahan informasi dalam mengevaluasi kinerja yang dilakukan pemerintahan. Penyajian laporan pemerintahan dapat diakses siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintah, dalam hasil tersebut rakyat juga berhak untuk menuntut apabila terjadi penyelewengan yang merugikan banyak pihak. Bagi pemerintah akuntabilitas wajib dimiliki karena dengan adanya akuntabilitas bisa menambah kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan dalam melakukan

segala aktivitas yang dilaksanakan (Widyatama 2017). Laporan keuangan yang baik harus sesuai dengan asas yang tercantum dalam “*Good Governance*” meliputi: *Partisipasi, Rule of Law, Transparan, Resposif, Accountability*. Partisipan dan pengawasn dari rakyat pada implementasi pelaksanaan dana desa bertujuan untuk menciptakan desa mandiri dapat tercapai (Arfiansyah 2020).

Good governance merupakan mekanisme yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hubungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis berdasarkan asas Pancasila. Menurut Osborne and Geabler, 1992; OECD and World Bank, 2000; LAN dan BPKP, 2000: 6, terdapat tiga pilar dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (Emerson 2022)

1. Transparansi, keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan yang sehat meliputi ekonomi, lingkungan sosial dan politik.
2. Partisipasi meliputi demokratis, kebebasan HAM, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
3. Tanggungjawab, penyampaian laporan pertanggungjawaban dengan amanah sesuai dengan apa yang terjadi dan tercapai tujuan mensejahterakan masyarakat, serta bersedia menerima sanksi bila terjadi kekeliruan.

Laporan keuangan merupakan output yang dihasilkan dari akuntansi, begitupun termasuk akuntansi sektor publik keuangan pemerintahan. penyebutan laporan

keuangan yang dihasilkan dalam pemerintahan adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Penyusunan LAKIP berdasarkan pada anggaran yang terjadi selama tahun berjalan secara lengkap meliputi laporan perbandingan perencanaan dan output yang dihasilkan. Penyajian laporan keuangan yang baik, akurat dan benar menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan apa yang akan diambil dalam waktu kedepannya.

Unsur pendukung terciptanya akuntabilitas salah satunya ialah digitalisasi. Pemerataan digitalisasi dari berbagai sektor pemerintahan telah membantu untuk mempermudah proses administrasi dan transparansi. Digitalisasi telah diatur dalam PP No 56 Tahun 2005 yang menindaklanjuti dalam terselenggaranya proses pembangunan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah daerah wajib dalam mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dan masyarakat mudah untuk memahaminya (Peraturan Pemerintah 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Hendaris (2021) menyatakan bahwa digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al.,(2020) membuktikan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Transparansi memberikan keterbukaan yang jujur dan benar pada masyarakat. Hasil penelitian Sukmawati (2019) menyatakan bahwa keterbukaan mempengaruhi keuangan desa secara negatif serta tidak signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Yuhanis Lawdewi dengan hasil bahwa transparansi tidak berhubungan secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Ladewi et al. 2020). Sedangkan dalam penelitian Windyastuti,dkk menyatakan bahwa transparansi berhubungan secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Windyastuti et al. 2019).

Kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam akuntabilitas dana desa. Penelitian yang dilakukan terdahulu menunjukkan jika Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Ardianti 2017). Penelitian yang dilaksanakan oleh Suryani (2021) menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa masih perlu adanya peningkatan kompetensi. Adapula penelitian yang menunjukkan hasil berbeda, pada penelitian Widyatama (2017) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sweetenia et al (2019), Tarjo (2019), NURDIN (2019) mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningsih (2022) dengan topik pembahasan Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa menghasilkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan ini sejalan dengan penelitian dari Ayem (2022) dengan topik Determinansi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa memiliki hasil penelitian bahwa kompetensi perangkat desa

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi 2019). Penelitian dari Hendaris (2020) menerangkan kinerja perangkat desa, pengendalian intern, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan terhadap penggunaan dana desa. Ketaatan pelaporan keuangan dilakukan oleh Heni Risnawati, dkk (2022) Nasution, dkk (2021) bahwa ketaatan dalam pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Berdasar pada penelitian Hasriani Faiz Fakhruddin bahwa pelaksanaan Good Governance belum maksimal dengan adanya anggapan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui laporan pertanggungjawaban dari aparat desa (Hasriani et al. 2016).

Penelitian ialah pengembangan dari Ningsih (2022) yang meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa, dengan hasil penelitian : akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa; transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa; partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Dari variabel tersebut penelitian ini memiliki kesamaan pada dua variabel yaitu akuntabilitas (Y) dan transparansi (X). Perbedaan dalam penelitian ini ialah terdapat pada dua variabel tambahan yaitu digitalisasi dan kompetensi SDM.

Perbedaan selanjutnya dalam penelitian ini dengan sebelumnya mengacu di wilayah Kabupaten Pati yang masih jarang dilakukan penelitian di wilayah tersebut sehingga cocok untuk dilakukan penelitian di wilayah tersebut. Banyaknya alokasi

dana desa serta fenomena penyelewengan yang dilakukan oleh aparaturn pemerintahan desa menjadi alasan diselenggarakannya penelitian ini. Kesamaan beberapa variabel untuk membuktikan secara empiris dalam penelitian di Kabupaten Pati meliputi digitalisasi, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas penggunaan dana desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan peningkatan kepercayaan kembali masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu peneliti menambahkan digitalisasi dalam variabel penelitian, dimana pada masa sekarang ini digitalisasi merupakan kompetensi yang penting dan harus dikuasai oleh aparaturn pemerintahan guna mendukung akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mewujudkan sistem good governance.

Pengambilan sampel memakai metode survei dengan pengumpulan data pengisian kuesioner informasi lapangan. Analisis data memakai analisis *purposive sampling*. Didorong dengan adanya rasa untuk berperan aktif pada penyampaian aspirasi dari masyarakat luas supaya terciptanya transparansi, kesejahteraan masyarakat yang seringkali sebagai alasan adanya dana tambahan namun terkadang alokasi dana tidak sinkron dengan anggaran yang diajukan. Berbagai alasan tersebut menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Dengan judul:

“Pengaruh Digitalisasi, Transparansi, dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan penjabarana dalam latar belakang diatas, maka dapat diambil perumusan permasalahan dalam penelitian ialah:

1. Bagaimana Pengaruh Digitalisasi dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana Pengaruh Transparansi dari Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Bagaimana Kompetensi SDM Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Apakah Digitalisasi berpengaruh dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Transparansi berpengaruh dari Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Kompetensi SDM Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa transparansi kinerja penggunaan dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas
2. Menganalisis bahwa digitalisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas penggunaan dana desa
3. Menganalisa bagaimana kompetensi dari aparatur pemerintahan, kualitas SDM dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas penggunaan dana desa

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi perbandingan, penyempurnaan penelitian terdahulu.

2. Manfaat Praktisi

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan data empiris bagi ilmu akuntansi sektor publik agar bisa memberikan pengetahuan tambahan. Menjadi referensi untuk para akademisi dan juga dapat menghimpuni informasi sebagai bahan sumbangan informasi bagi pemerintah maupun masyarakat guna meningkatkan Kualitas dan Kinerja dalam penggunaan dana desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Good Corporate Governance*

Teori ini memberikan penjelasan pengendalian pada perusahaan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan kekuatan serta kewajiabn bagi perusahaan. Menurut Efendi (2017) *corporate governance* merupakan sebuah sistem untuk meengatur serta mengendalikan perusahaan dan meningkatkan nilai tambah dalam perusahaan. Dalam studi *Asian Development Bank* (ABD) konsep *good corporate governance* diharapkan melindungi pemegang saham (*steakholder*) dan kreditur untuk kembali memperoleh investasinya (Sudarmanto 2021).

Keadaan Indonesia dimasa reformasi birokrasi yang belum dapat menunjukkan arah perkembangan dengan masih banyaknya ditemukan birokrasi arogan dan rakyatlah yang membutuhkan. Belum terurainya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan kepribadian atau karakter birokrat yang masih jauh dari standar efektif serta efisien. Pemerintah mendukung pelaksanaannya birokrasi yang bertindak sesuai fungsinya dengan tepat, cepat dan konsisten untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan baik dengan sebuah *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Situasi yang paling mengemuka dan menjadi tuntutan dimasyarakat dalam masa kini adalah bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mengelola administrasi publik.

Konsep *corporate governance* sendiri dapat diartikan sebagai sistem yang memberikan nilai tambah dalam perusahaan. Ruang lingkup *Good Corporate Governance* meliputi 5 pilar yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* (KEP/31/MEKUI/08/2006). Terdapat dua teori dalam hal ini yaitu:

1. Agensi teori.

Agensi teori memberikan pandangan bahwa manajemen sebagai “agen” bertindak penuh bagi kepentingan sendiri bukan pihak yang arif serta bijaksana. Agensi teori mendasarkan agen harus bertindak untuk kepentingan klien. Dalam teori ini memecahkan dua permasalahan meliputi keagenan dan pembagian resiko. Dimana keagenan muncul ketika tujuan *principal* dan agen bertentangan (*conflict of interest*) dan pembagian resiko akan muncul ketika sikap *principal* terhadap resiko berbeda dengan sikap agen, memunculkan kedua tindakan yang berbeda (Sudarmanto 2021).

Implikasi dalam penerapan teori ini dapat dilihat ketika pengelolaan dana desa yaitu pemerintah yang memiliki tindakan sebagai agent memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara akuntabel. Masyarakat bertindak sebagai *principal* dimana pertanggungjawaban agen dilakukan. Meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa artinya dapat mengurangi angka penyelewengan serta meningkatkan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan.

2. *Stewardship teori.*

Stewardship mengasumsikan filosofi sifat manusia pada hakikatnya yaitu jujur, tanggungjawab, serta integritas. *Stewardship* bertindak menjadi pelayan masyarakat atau publik sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyangkutkan kepentingan individu. Kepercayaan publik memiliki tanggungjawab besar dalam pengelolaan alokasi sumber daya yang melandasi prinsip pada pihak pelayan publik (Hardiningsih et al. 2020). Secara jelas karakteristik yang telah ditentukan dalam penyusunan laporan keuangan ialah tepat, andal dan dapat dimengerti hingga dalam praktik yang dilaksanakan dalam organisasi pemerintahan desa telah menjalankan tugas serta wewenangnya untuk bertanggungjawab membuat laporan keuangan (Budiana 2019).

Implikasi teori ini sesuai dengan penelitian karena dapat memperjelas bagaimana peran penting pemerintahan desa sebagai suatu lembaga yang merupakan pelayan publik dan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Pemerintahan desa beserta para jajarannya berkewajiban pengelolaan sumber daya beserta pelaksanaan tugas yang sudah dirancang kepada publik sebagai bentuk tanggungjawab. Bentuk kewajiban pertanggungjawaban publik dalam penggunaan dana desa tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelaporan secara berkala kepada masyarakat. Pelaksanaan program kegiatan dengan demikian pemerintah desa telah mengelola sumber dana dengan baik dan melaksanakan ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas *ialah* salah satu *Corporategovernance*. Akuntabilitas merupakan kinerja serta tindakan seorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada para pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Naryanti 2022). Menurut UU No. 06 2014 tentang pembahasan Desa, dijelaskan bahwasannya keuangan dalam pemerintahan desa merupakan semua hak serta kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Yang dimaksud dengan akuntabilitas ialah pemerintahan desa harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan undang-undangnya sesuai asas yang menentukan setiap pelaksanaan kegiatan dan hasil penyelenggaraan kegiatan (Fabiana M 2019). Penggalakkan akuntabilitas untuk meningkatkan efisiensi mutu kualitas kinerja organisasi pemerintahan desa dan untuk terciptanya peningkatan taraf kualitas hidup dimasyarakat.

Peraturan pemerintah No 71 2010 menjelaskan standar akuntansi pemerintah memuat pembahasan tujuan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kerangka konseptual (BPK 2010). Pengelolaan dalam dana desa meliputi *planing, organizing, actuating, controlling* dalam mempertanggungjawabkannya (Puspa 2020). Asas dalam pengelolaan keuangan yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipan serta harus disiplin sesuai dengan penganggaran realisasi APB desa.

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dimulai dengan perencanaan, persiapan, dan implementasi yang akurat untuk diinformasikan dan dipertanggungjawabkan ke daerah (Aziiz 2019). Pada prinsip ini segala bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam pemerintahan desa diserahkan secara langsung kepada pemerintah desa dan jajarannya agar dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan jujur. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) menurut UU No.06 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (2) kepala desa berperan penting dalam memegang kekuasaan pengelolaan dana desa. Sebagai ketua atau *leader* tim pelaksana untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa (Fabiana M 2019).

2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Akuntansi dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, menghitung, meringkas peristiwa dan transaksi keuangan, serta penyajian hasilnya berupa laporan keuangan. Standar akuntansi adalah dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang dijadikan sebagai fondasi bagi setiap akuntan. Penyusunan laporan keuangan dalam pemerintahan terdiri dari: Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgeting Report), Laporan Finansial, dan CaLK. Penyusunan laporan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan sehingga tercapai tujuan yang diinginkan dalam organisasi yaitu “Good Governance”.

Standar Akuntansi Pemerintah adalah pedoman atau prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (BPK 2010). SAP disahkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan serta disusun berdasar kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan diperoleh nilai disusun berpedoman pada standar yang ada, dikuatkan oleh Dermawan (2019) Pujanari, dkk (2017) dan Sanjaya, dkk (2017) membuktikan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan.

Akuntansi pemerintah merupakan kegiatan yang meliputi aktivitas dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan peristiwa atau transaksi ekonomi sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan, meliputi pengelolaan sumber dana publik pada lembaga pemerintah. Dalam sektor publik ada dua klasifikasi yang berbeda, terdiri dari akuntansi untuk pemerintahan dan akuntansi untuk sosial. Akuntansi pemerintahan menyajikan informasi aktual dalam aktivitas ekonomi tanpa profit bertujuan mensejahterakan masyarakat. Anggaran yang dibuat setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Sedangkan sosial memiliki tujuan yang sama seperti akuntansi pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat, namun

dana yang dikelola bukan dari anggaran pemerintah melainkan dana suka rela ataupun dana usaha bersama.

Penerapan Akuntansi Keperilakuan (*behavioral accounting*) adalah dasar dalam gambaran pelaksanaan SAP, diantaranya berhubungan dengan pertimbangan pelaksanaan kegiatan seluruh pelaku pemangku kepentingan dalam menentukan faktor-faktor penyusunan kualitas penyajian laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan harus mencakup semua unsur yang terkandung dalam *Good Governance*. Salah satu diantaranya akuntabilitas ataupun tanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

2.4 Digitalisasi

Digitalisasi merupakan sarana perangkat *hardware*, *software*, dan *useware*. Teknologi informasi yang merupakan media dalam infrastruktur untuk memperoleh data. Aplikasi komputer memiliki kelebihan dalam ketelitian serta akurasi dalam hasil pengelolaan data, hingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan (Windyastuti et al. 2019). Seiring dengan perkembangan zaman, digitalisasi semakin berkembang menciptakan teknologi baru yang secara canggih sehingga transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat mewujudkan akuntabilitas yang baik dan jujur. Digitalisasi menerapkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Sebuah sistem buatan BPKP yang digunakan untuk mengadministrasikan serta mengelola data keuangan dana desa

dalam pengambilan keputusan untuk pertanggungjawaban laporan keuangan desa (R. B. Hendaris 2020).

Digitalisasi dapat memperlancar serta mempermudah aparatur desa untuk mengevaluasi kesalahan yang mungkin dapat terjadi dan kinerja dalam pengelolaan dana desa. Kualitas laporan keuangan dapat tercapai dengan pemanfaatan teknologi informasi (Zubaidi 2022). Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung didalam peraturan pemerintah No 56 tahun 2005 yang telah direvisi dalam aturan PP No 65 Tahun 2010 bahwa pentingnya aparat pemerintah dalam memanfaatkan teknologi (Peraturan Pemerintah 2014). Dengan adanya teknologi kompetensi dari SDM aparatur perangkat desa dalam kinerja sehingga transparansi dan akuntabilitas lebih terbuka dan responsibel. Meningkatkan potensi pemerintahan desa dalam mengelola keuangan serta membantu dan mempermudah dalam peningkatan kinerja.

2.5 Transparansi

Transparansi ialah keterbukaan pemerintah didalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik pada pihak yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018). Transparansi merupakan penyampaian informasi secara jujur dan apa adanya kepada publik guna mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukann oleh instansi pemerintahan dalam hal ini aparatur pemerintahan desa untuk mengelola dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku dalam upaya perwujudan akuntabilitas. Suatu informasi yang diperoleh dengan adanya kesesuaian

dalam kepentingan masyarakat secara langsung dapat diperoleh semua pihak yang membutuhkan (Tambuwun 2018).

Transparansi menjadi faktor yang berpengaruh secara penting karena sebagai wujud bukti bahwa pemerintahan desa telah mempertanggungjawabkan penggunaan serta pengelolaan dan desa secara efektif dan efisien.

2.6 Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi bermula dari bahasa latin “*competere*” yang berarti “menjadi cocok”. Kompetensi dapat dimaknai dengan pengetahuan, keahlian dan kemampuan terhadap konteks manajemen sumber daya manusia (Widyatama 2017). Kompetensi merupakan keahlian serta keistimewaan seorang pegawai negara berupa pengetahuan, ketrampilan serta sikap yang diperlukan guna melaksanakan tugas sehingga orang tersebut dapat melaksanakan kewajibannya secara efisien, efektif, profesional, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46 2003. Keahlian yang dimiliki aparatur pemerintahan desa menentukan pencapaian kinerja. Dalam aspek kompetensi diantaranya dapat berupa sifat, sistem penilaian, sikap, pengetahuan maupun ketrampilan (Puspa 2020).

Untuk meningkatkan dan mewujudkan kompetensi dibutuhkanlah SDM yang memadai. SDM berperan penting untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana keuangan pemerintahan desa. Kompetensi yang dimiliki oleh SDM haruslah mempunyai pengetahuan serta kemampuan yang baik dalam mengelola dan

mempertanggungjawabkan penggunaan dan desa. Dalam hal ini SDM yang dimaksud ialah para perangkat atau jajaran pengurus didalam pemerintahan desa, terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan bagian kemasyarakatan beserta jajaran lainnya.

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian tersebut SDM menjadi faktor yang penting dan memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan dana pemerintahan desa. Aparatur desa profesional dapat mengelola serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa sehingga meningkatkan integritas dalam akuntabilitas tata kelola dana desa (Umaira 2019). Baik buruknya kinerja pemerintahan desa bergantung terhadap kompetensi dan kinerja dari para perangkat desa untuk membuat suatu perencanaan hingga pertanggungjawaban atau akuntabilitas.

2.7 Pengelolaam Dana Desa

Governance atau tata kelola ialah sebuah sistem yang menjadi acuan dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Tata pengelolaan yang baik (*good corporate governance*) dapat menciptakan akuntabilitas yang tinggi juga (Ardianingsih et al. 2018). Tiga prinsip pengelolaan yang baik diantaranya transparansi, partisipasi dan akuntabel. Dikutip dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 22 pada 2016 berisi tentang penetapan prioritas dana desa tahun 2017. Dana desa ialah dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. dana desa dianggarkan dlam tiap tahun sudah tercantum didalam APBN dan diberikan pada setiap desa, menjadi salah

satu sumber pendapatan dari desa (Indrawa 2017). Kepala desa ialah seorang pemegang kekuasaan dalam pengelolaan dana desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan menurut Permendagri 113 pada 2014 (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 2014).

Pengelolaan dan desa ialah sebuah proses dalam mengelola keuangan yang berpegang terhadap prinsip Rencana dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa yang kemudian diimplementasikan dalam dua jenis pelaksanaan kegiatan program, meliputi : (1) Dana desa dipergunakan dalam pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa serta dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya (2) Pembangunan serta pemberdayaan menjadi prioritas dalam penggunaan dana (Permatasari 2022).

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan variabel Digitalisasi, Transparansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sejalan oleh beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
1	Winda Ningsih, Eriana Kartadjumena (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa pada Desa di Kecamatan	(Y) Pengelolaan Dana Desa (X1) Akuntabilitas (X2) Transparansi (X3)	Hasil : <ul style="list-style-type: none"> Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa Transparansi

	Semarang Kabupaten Garut	Partisipasi	berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa
			<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
2	Siska Apriana (2019)	The Influence of Organizational Commitment, Competence of Village, Managemen Officers, Utilization of Information Technology Accountability of Village Financial Managemen	(Y) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1) and Komitmen Organisasi (X2) Kompetensi Pengelolaan Dana Desa (X3) Pemanfaatan Pengelolaan Teknologi Informasi
			<p>Hasil :</p> <p>Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut variabel Y mempengaruhi variabel X secara signifikan,.</p>
3	Indah Kusuma Wanda ni, Yuniati n Trisnawati D.K.W (2022)	Dampak Akuntabilitas, Keterbukaan dan Keikutsertaan Warga pada Pengurusan Dana Desa	(Y) Pengurusan Dana Desa (X1) Akuntabilitas (X2) Transparansi (X3) Partisipasi Masyarakat
			<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengurusan dana desa Keterbukaan berpengaruh terhadap pengurusan dana desa Akuntabilitas memiliki pengaruh 68,5% terhadap pengurusan dan desa sissanya 31,5% dipengaruhi faktor

				lainnya
4	Arif Widyatama, Lola Novita & Diarepati (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	(Y) Akuntabilitas (X1) Kompetensi Aparatur (X2) Sistem Pengendalian	<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi aparatur dari pemerintahan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas. • Sistem pengendalian aparatur pemerintahan berpengaruh pada akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.
5	Amanda Mutiara Sweetenia, Eka Pinditya Ayu Caesari, Arum Frida Aprillia, & Annisa Hakim Purwanti (2019)	Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa	(Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) Kompetensi Aparatur (X2) Sistem Pengendalian Internal (X3) Penyajian Laporan Keuangan	<p>Hasil :</p> <p>Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kompetensi Aparatur tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan sistem pengendalian internal serta penyajian laporan keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan dan desa.</p>
6	Enggar Wahyuning Pahlawan,	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal,	(Y) Akuntabilitas (X1) Kompetensi Aparatur	<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

	Anita Wijayanti & Suhendro (2020)	Pemanfaatan Teknologi Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	(X2) dan Sistem Pengendalian Internal (X3) Pemanfaatan Teknologi (X4) Partisipasi	akuntabilitas pengelolaan dan desa. <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian tidak berpengaruh secara signifikan tetapi kompetensi aparat dan partisipasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7	Yuhani Lawdewi, Taufiq Supriadi, Juska Meidy Enke Sjam, Welly, Agista & Hery Subowo (2020)	The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management	(Y) Akuntabilitas (X1) Transparansi	Hasil : <ul style="list-style-type: none"> • Transparansi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.
8	Fitri Sukmawati & Alfi Nurfitriani (2019)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus Pemerintahan Desa Kabupaten Garut)	(Y) Pengelolaan Keuangan Desa (X1) Transparansi (X2) Akuntabilitas	Hasil : <ul style="list-style-type: none"> • Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa pada 30 pemerintahan dalam kabupaten Garut • Akuntabilitas berpengaruh terhadap

				pengelolaan dana desa Kabupaten Garut yang terdiri dari 30 pemerintah desa.
9	Windya stuti, Lita Yulita Fitriyani, Marita & Mufida Nur Afifah (2019)	Accountability and Transparancy in Managing Village Found in Ngawen, Bloro, Central Java	(Y) Pengelolaan Dana Desa (X1) Transparansi (X2) Akuntabilitas	Hasil : • Terdapat pengaruh antara variabel secara signifikan.
10	Novita Puspita Shanti & M G Kentris Indarti (2021)	Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus Kecamatan Semarang Barat)	(Y) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (X1) Kompetensi (X2) Komitmen Organisasi (X3) Sistem Pengendalian Internal	Hasil : • Kompetensi aparatur pemerintahan desa tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang akuntabel. • Komitmen memiliki berpengaruh positif pada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini untuk menguji bagaimana pengaruh digitalisasi, kompetensi SDM dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat diambil hiotesis sebagai berikut:

2.9.1 Pengaruh Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Perkembangan teknologi atau biasa disebut dengan Digitalisasi telah terjadi dalam berbagai sektor dalam perekonomian tak terkecuali dalam pemerintahan. digitalisasi membantu mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan mengelola pelaporan secara lebih efektif serta efisien. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan peranan sistem yang berpengaruh penting karena perkembangan teknologi dapat memberikan informasi, menyimpan informasi serta berbagi informasi dengan cara yang mudah dan cepat, (Indrianasari 2017). Dalam penerapannya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah mengembangkan suatu sistem aplikasi keuangan desa yang disebut dengan Siskeudes untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa secara akuntabel dan transparan. Aplikasi komputer memiliki kelebihan serta ketelitian dan tingkat akurasi yang tinggi dalam mengolah data sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan, (Yulianti 2019).

Teori *stewardship* memiliki kaitan sesuai peranannya dimana rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*. Pengaruh pemerintahan desa cukup besar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang mana pertanggungjawaban pemerintah desa harus disajikan secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Diana (2020) menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Al 2017), dan penelitian yang dilaksanakan Lestari dkk (2020) membuktikan juga didalam penelitiannya bahwa

teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan dengan merumuskan :

H1: Digitalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.9.2 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Salah satu elemen penting dan penggerak suatu aktivitas dalam organisasi atau dalam kasus ini adalah organisasi sektor publik yaitu Sumber Daya Manusia. SDM merupakan faktor penting untuk mengimplementasikan akuntabilitas sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keahlian atau biasa disebut dengan *skill* merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM. Aparatur desa yang profesional dapat mengelola serta mempertanggungjawabkan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, (Umaira 2019). Tanggungjawab serta integritas yang tinggi dari seorang individu akan menghasilkan *skill* yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok serta wewenang yang dimiliki. Aparatur desa mutlak harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengatur segala bentuk kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan Naryanti (2022) memberikan pernyataan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Made et al (2017) menghasilkan bahwa adanya pengaruh

kompetensi aparatur desa dan memiliki peran penting dalam kemajuan organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiana (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. sehingga dapat diuraikan dengan rumusan hipotesis penelitian:

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.9.3 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu awal dari perencanaan penyusunan APBDes melalui musyawarah rencana pembangunan pada berbagai tingkat. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan dana desa ialah dengan keterbukaan atas segala informasi yang diperoleh serta melibatkan masyarakat setiap pengambilan keputusan. Menurut Putra (2017) semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan maka makin mudah dalam mewujudkan *good governance*.

Menurut Ningsih and Kartadjumena (2022) bahwa transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap tata desa, sejalan dengan penelitian (Risya Umami 2017).sehingga dapat diambil hipotesis bahwa :

H3: Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.10 Kerangka Pemikiran Teoritis

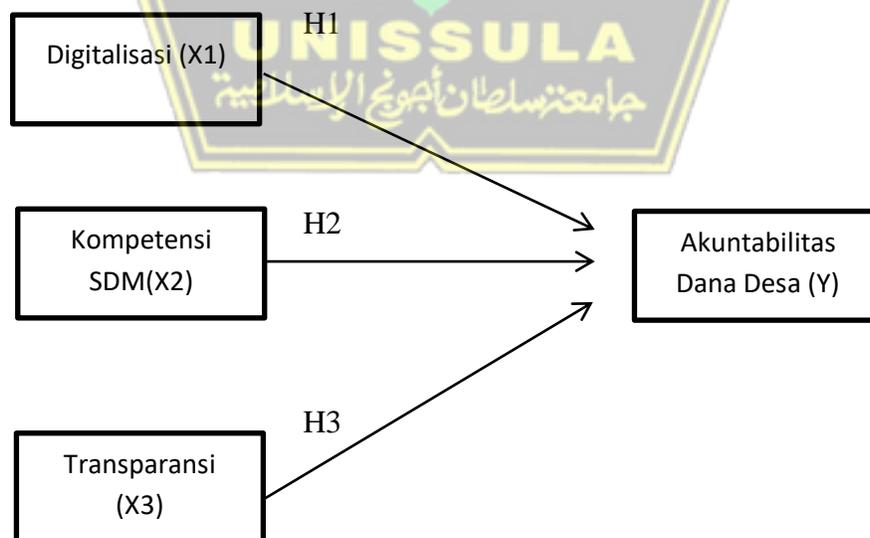
Pada penelitian ini didasarkan pada teori *Stewardship*. Teori ini mengatakan bahwa tidak ada keadaan kondisi dimana para manajemen termotivasi untuk tujuan melainkan lebih fokus tujuan dan sasaran utama kepentingan organisasi. Pada teori ini manajemen pemerintah sebagai *steward* dan rakyat sebagai *principal* menciptakan hubungan yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, jujur pada pihak lainnya dan integritas. Manajemen pemerintah dituntut untuk memberikan jasa pelayanan bagi masyarakat (Windyastuti et al. 2019).

Pentingnya penerapan *Good Governance* agar dalam pengelolaan dana desa mampu mewujudkan suatu akuntabilitas sehingga mewujudkan pemerintahan yang jujur serta berintegritas yang tinggi. Akuntabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi: Kompetensi SDM, Digitalisasi, serta Tata Kelola Desa. Akuntabilitas mengelola dana desa dimana pemerintah berperan sebagai agen serta masyarakat sebagai principal. Agen memiliki tugas yang sangat penting untuk mengkoordinir seluruh pengelolaan dana desa serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau akuntabilitas secara jujur.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berkualitas juga berhubungan dengan digitalisasi serta penggunaan teknologi yang canggih sehingga terwujudlah akuntabel yang secara jelas serta jujur. Sistem pelayanan publik berbasis teknologi

atau biasa disebut Siskeudes sebagai dasar dalam pertanggungjawaban laporan keuangan desa untuk pengambilan keputusan. Transparansi juga pula sebagai prinsip yang mendorong terciptanya kauntabilitas yang baik sesuai dengan standar good governance. Transparannya informasi yang disampaikan pada masyarakat serta partisipasi masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang jujur serta bertanggungjawab. Kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam perwujudan akuntabilitas bentuk transparansi dari pelaporan penggunaan dana desa dari pemerintahan desa. Menurut pendapat Ardianti and Suartana (2017) kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi yang dimiliki sumberdaya manusia akan menunjang dalam setiap pelaksanaan pengelolaan dana desa (Aziiz 2019).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, kerangka pemikiran teoritis pada penelitian ini dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoriti



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan memakai pendekatan kuantitatif, yang bertujuan mengetahui bagaimana hubungan antara dua variabel yang ditekankan terhadap pengujian hipotesis dengan pengukuran bentuk angka dan menganalisa dalam standar analisis prosedur statis. Jenis penelitian ialah analisis diskriptif kuantitatif dengan *explanatory research*. *Explanatory research* merupakan penelitian yang bertautan diantara variabel hipotesis (Imam 2018). Hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya ialah yang akan diuji kebenarannya sehingga dapat memberikan ungkapan berpengaruh atau tidaknya hubungan dari tiap variabel. Berdasarkan pengertian dari Imam (2018) *explanatory research* akan memberikan penjelasan dalam ungkapan pengaruh keadaan serta kondisi yang menentukan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga variabel independen dapat terlihat pengaruhnya pada variabel dependen dalam pemetaan keadaan. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah metode survei, yaitu menggunakan kuesioner atau angket. Dengan demikian peneliti terjun langsung dalam pengambilan sample dari populasi yang ada. Metode ini dianggap lebih mudah untuk dilakukan sehingga dapat mempercepat dalam proses penelitian. Penelitian ini menganalisa statistik pengaruh digitalisasi, transparansi dan kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi ialah spesifikasi atau karakter diinginkan oleh peneliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian, terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakter tertentu yang general (Sugiyono 2018). Peneliti memilih Desa di Kecamatan Tayu sebagai Objek yang akan diteliti karena Kecamatan tersebut belum ada yang melakukan penelitian. Berdasarkan prasarvei dari beberapa web yang dilakukan, dalam web kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, Kecamatan Tayu merupakan kecamatan yang transparansi dana belum dipaparkan secara transparan sehingga hal tersebut mempengaruhi kompetensi SDM dalam penggunaan teknologi. Sesuai dengan fenomena penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Pati tersebut berdampak pada kurangnya optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan sehingga potensi terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa sangat mungkin terjadi. Sesuai penelitian dari Heni Risnawati, Sukma Wijayanti, and , Sri Retnoningsih (2022).

3.2.2 Sample

Sampel ialah bagian karakteristik dari jumlah yang dimiliki populasi (Sugiyono 2018). Observasi dilaksanakan dengan teknik sampling jenuh atau biasa disebut sensus, dimana dalam penelitian ini setiap populasi dapat dijadikan sebagai sampel. Pengambilan sampling jenuh (sensus) merupakan teknik pengambilan sampel ketika dalam penelitian semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono 2018).

Sampel penelitian ini ialah pegawai pemerintahan desa. Pegawai memiliki peran penting untuk menyusun pelaporan dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati yang diambil di Kecamatan Tayu terdiri dari 21 Desa yang nantinya ada 84 data untuk kemudian diolah. Terdapat 21 desa yang nantinya menjadi populasi sehingga penelitian ini akan diperoleh 84 orang populasi yang setiap desanya akan diperoleh 4 data.

Pengujian data diperoleh 84 data perangkat desa, dengan kriteria pemilihan sampel yaitu terdiri dari 4 bagian aparatur desa. Diantaranya Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara serta Bagian Kemasyarakatan atau Moden. Pemilihan sampel tersebut didasarkan terhadap peranan secara langsung didalam pengelolaan dana desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari responden. Data primer merupakan data yang berasal dari tanggapan terhadap kuesioner yang telah dibagikan kepada responden (Indrianto 2016). Teknik dengan metode kuesioner dengan skala likert nantinya ada beberapa daftar pertanyaan sebagai pengukur pengaruh antar variabel penelitian yang akan diajukan kepada responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai penelitian ialah mengumpulkan data dengan survei kuesioner. Menurut Indrianto dan Bambang Supomo (2016) metode survei dalam

penelitian memiliki tujuan memperoleh data secara cepat dari responden melalui daftar beberapa pertanyaan, secara lisan maupun tulisan yang diharapkan mampu meningkatkan *response rate* tinggi. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang berisi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berkaitan dengan digitalisasi, transparansi dan kompetensi. Penggunaan metode deskriptif kualitatif sejalan pada metode yang digunakan, teknik pengumpulan data penelitian meliputi observasi atau pengamatan, wawancara serta dokumentasi.

Pengukuran penelitian dalam pendapat responden dengan skala likert. Skala likert dipergunakan dalam penelitian ini sebagai pengukur sikap dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial yang terdiri dari 5 opsi bagian dalam pengukuran, diantaranya sebagai berikut :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel merupakan nilai dari obyek atau kegiatan penelitian untuk penarikan kesimpulan, maka dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdiri dari variabel dependen (Y) dan variabel Independen (x).

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Y atau biasa disebut dengan variabel dependen merupakan variabel yang dapat terpengaruhi dengan variabel bebas. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau yang biasanya disebut dengan variabel X merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi pada variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang terdiri dari, Digitalisasi, Kompetensi SDM serta Transparansi.

3.5.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Relevan, dapat dibandingkan, andal, mudah dipahami (Aziiz 2019)	Likert 1-5
Digitalisasi	Komputerisasi dalam transaksi keuangan, pembukuan, penggunaan serta pemanfaatan internet dalam pertanggungjawaban distribusi laporan keuangan dan arsip dokumen, penggunaan perangkat pintar untuk internal ataupun eksternal. (Aziiz 2019)	Likert 1-5
Transparansi	Kesesuaian penyajian laporan, ketepatan waktu, akuntabilitas dalam penyajian laporan dan partisipasi dari masyarakat. (Aziiz 2019)	Likert 1-5
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kapasitas pengetahuan, keahlian teknik, kemampuan pemecahan masalah dan mencari solusi, inisiatif, keramahan dan	Likert 1-5

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data merupakan penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan dalam proses penyusunan dan pengelolaan data untuk memberikan tafsiran data yang telah diperoleh. Teknik analisis yang nantinya digunakan ialah Analisis Regresi Linier Berganda dengan penggunaan software SPSS (*Statistical Program for Social Science*). Dalam pengujian penelitian detail dalam pengolahan data yang dipergunakan meliputi: Statistika Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis.

Sugiyono (2019) menentukan klasifikasi dalam penilaian tanggapan responden dengan menghitung interval tanggapan, sebagai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Skor maksimum} - \text{Skor minimum}}{\text{Banyaknya bilangan}}$$

3.6.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan statistika yang menunjukkan objek secara dideskripsikan atau analisa dengan menggunakan data sampel atau populasi. Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa pengelompok menggunakan minimum, maksimum, median, mean serta standar deviasi.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas Data

Kuesioner atau instrumen dapat dikatakan valid bila pertanyaan yang disajikan pada instrumen tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Imam 2018). Pengujian validitas dipergunakan dalam memperkirakan valid atau keabsahan dari suatu kuesioner. Dalam pengukuran validasi atau keabsahan dari kuesioner yaitu dengan membuat korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor total konstruk atau variabel. Untuk menguji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r tabel sehingga *degree of freedom* (df) = $n-2$, dimana n yang dimaksud ialah jumlah sampel.

- Jika r hitung $>$ r tabel maka pernyataan dinyatakan valid atau sah
- Jika r hitung \leq r tabel maka pernyataan dinyatakan tidak valid atau tidak sah

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas bertujuan untuk mengukur apakah didalam penelitian menghasilkan atau mendapatkan konsistensi atau kemampuan dalam memperoleh hasil yang hampir sama dengan respon persepsi responden (Heni Risnawati, Sukma Wijayanti, and , Sri Retnoningsih 2022). Menurut Imam (2018) kuesioner yang reabel terjadi jika respon yang diberikan berdampak stabil atau konsekuen dari waktu ke waktu. Penguji reabilitas merupakan sebuah alat untuk mengukur sejauh mana kestabilan antara hasil pengamatan yang dilakukan dalam kuesioner pada waktu yang

berbeda. Uji reabilitas pada penelitian menggunakan uji statistik dengan menggunakan alat SPSS. Menurut Imam (2018) metode yang digunakan untuk menguji reabilitas kuesioner ialah dengan menggunakan uji statistika Cronbach Alpha dimana suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika Cronbach alpha $> 0,06$.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Imam (2018) uji asumsi klasik dilakukan ketika menguji model regresi linier yang didapat memiliki konsistensi. Diantanya beberapa uji asumsi klasik yang dipergunakan, meliputi:

1. Uji Normatif

Uji normatif menurut Imam (2018) merupakan model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan oleh regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normatif dilakukan dengan metode *Kolmogorov Smirnov*. Dalam pengambilan keputusan ditetapkan dengan ketentuan:

- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat dikatakan data terdistribusi secara normal.
- Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ialah pengujian model regresi dengan temuan korelasi antar variabel. Dalam penelitian ini menggunakan nilai toleransi dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Uji multikolonieritas ialah kondisi penelitian dimana model regresi menemukan korelasi yang sempurna antar variabel independen (Imam 2018). Nilai toleransi VIF (*Variance Inflation Factor*) berikut ini:

- Jika nilai toleransi $< 0,10$ VIF > 10 maka terjadi multikolonieritas
- Jika nilai toleransi $> 0,10$ VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas

3. Uji Heteroskedastistas

Model regresi yang baik ialah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastitas didalamnya (Imam 2018). Uji *heteroskedastistas* merupakan kondisi dalam penelitian dimana model penelitian regresi terdapat ketidaksamaan varian dari nilai residu pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat *variance* dalam regresi dari residu satu pengamatan. Ada dua asumsi dalam uji heteroskedastisitas ialah, Jika pengamatan tetap disebut dengan *homokedastisitas* dan jika pengamatan tidak tetap maka disebut dengan *heteroskedastisitas*. Pengujian yang dapat dilakukan dalam uji heteroskedastisitas ialah dengan menggunakan uji grafik plot dan uji glejser (Imam 2018).

Dalam pengujian grafik plot digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya *heteroskedastitas* dengan melihat pertimbangan dari grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residu SRESID. Dasar dalam analisis ini ialah jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk sebuah pola teratur, maka telah teridentifikasi *heterokedastisitas*. Jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas serta dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heterokedastisitas*.

Dalam asumsi *heterokedastisitas* juga menggunakan *uji glejser*. Pengujian digunakan dalam pengambilan keputusan. pengambilan keputusan didasarkan dalam uji statistik *glejser* yang sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka tidak terjadi heterokadestisitas.
- Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka terdapat heterokadestisitas.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan menguji persamaan variabel secara parsial maupun simultan.

3.6.4.1 Analisis Model Regresi

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menggunakan nilai dari variabel independen yang diketahui sehingga menghasilkan nilai variabel dependen (Sugiyono 2018). Penelitian ini menggunakan 3 alat sebagai analisis regresi berganda dalam

menguji pengaruh pada variabel terkait dengan 3 variabel bebas. Analisis persamaan regresi yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

$$\text{Persamaan regresi penelitian: } Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Digitalisasi

X2 = Transparansi

X3 = Kompetensi

e = Standar Error

3.6.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dipergunakan dalam mengukur besar variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terdapat diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), yang menunjukkan dimana nilai R^2 yang semakin tinggi suatu regresi atau nilainya mendekati 1, makin baik pula regresi yang dihasilkan (Imam 2018)

3.6.4.3. Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Pengujian statistik F memungkinkan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen secara simulatif terhadap variabel dependen (Imam 2018). Pengujian hipotesis yang akan diuji ialah berikut:

1. Penentuan Hipotesis

- a. H_0 : $\beta_i =$ variabel independen secara simulatif tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen
- b. H_a : $\beta_i \neq$ variabel independen secara simulatif mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen

2. Penentuan Tingkat Signifikan

Menggunakan pengujian significant level 0,05 atau $\alpha = 5\%$

3. Kriteria Pengambilan Keputusan

- a. apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 akan ditolak atau H_a diterima. Artinya variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai signifikan $> 0,05$, maka H_0 akan diterima atau H_a ditolak. Artinya semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.4 Uji Signifikan Parameter Individu (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menguji seberapa jauh mana pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara individual (parsial) menjelaskan variabel dependen (Imam 2018).

1. Hipotesis yang akan diujikan

- a. $H_0 : \beta_i = 0$, artinya bahwa semua variabel independen secara parsial bukan merupakan penjelasan yang signifikan variabel independen.
- b. $H_a : \beta_i \neq 0$ artinya bahwa variabel independen secara parsial merupakan penjelasan yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Penentuan Tingkat Signifikan

Menggunakan pengujian significant standar level 0,05 atau $\alpha = 5\%$

3. Kriteria Pengambilan Keputusan

- c. apabila nilai signifikansi $< 0,05$ (0,05) arah koefisien β sesuai dengan arah hipotesis dan maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- d. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ (0,05), maka H_0 akan diterima atau H_a ditolak. Artinya semua variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh digitalisasi, transparansi dan kompetensi terhadap pengelolaan dana desa dari 21 desa di kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Penggunaan data dalam penelitian ini ialah menggunakan data primer berupa hasil jawaban dari kuesioner yang telah disebar kepada responden. Responden terdiri dari 4 bagian dalam pemerintahan desa meliputi, kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menggunakan metode sampling jenuh dengan melibatkan 84 responden, yang secara langsung menerima kuesioner yang telah disebar oleh peneliti dilapangan (*Field Survey*).

Distribusi Penyebaran Kuesioner sebagai sample:

Tabel 4. 1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Nama Desa	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1	Pakis	4	3
2	Tayu Kulon	4	4
3	Sambiroto	4	4
4	Kalikalong	4	4
5	Kedungsari	4	4
6	Bulungan	4	4
7	Jepat Lor	4	4
8	Dororejo	4	4
9	Sendangrejo	4	4

10	Keboromo	4	4
11	Tendas	4	4
12	Tunggulsari	4	3
13	Tayu Wetan	4	4
14	Luwang	4	4
15	Purwokerto	4	4
16	Jepat Kidul	4	4
17	Kedungbang	4	4
18	Pondowan	4	4
19	Margomulyo	4	4
20	Bendokaton Kidul	4	4
21	Pundenrejo	4	4

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2023

Dari 84 kuesioner yang telah disebar, data yang kembali ialah 82 data atau 98% sehingga jumlah data yang diolah ialah 82 data (98%). Kuesioner yang telah kembali merupakan kuesioner yang telah sah dan tidak ada kuesioner yang tidak sah. Berikut rincian data kuesioner yang telah diperoleh:

Tabel 4. 2 Data Sample Penelitian

Kuesioner	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	84	(100%)
Kuesioner yang tidak kembali	2	(2%)
Kuesioner yang tidak lengkap	0	0
Kuesioner yang dapat diolah	82	(98%)

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2023

4.1.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang menjadi sample dipenelitian terbagi menjadi beberapa kelompok, meliputi jenis kelamin, usia, rentan waktu menjabat, tingkat pendidikan, dan jabatan.

Tabel 4. 3 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis_Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	69	84.1%	84.1%	84.1%
	Perempuan	13	15.9%	15.9%	100.0%
	Total	82	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 disajikan diatas dapat diketahui responden dalam penelitian terdiri dari 84,1 % responden laki-laki dan 15,9 % responden perempuan dari 21 desa. Penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki 84,2% dari total 82 responden yaitu 69 responden laki-laki dan 13 responden perempuan.

Tabel 4. 4 Karakteristik Usia Responden

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 tahun	4	4.9%	4.9%	4.9%
	31-40 tahun	15	18.3%	18.3%	23.2%
	41-50 tahun	41	50.0%	50.0%	73.2%
	>51 tahun	22	26.8%	26.8%	100.0%
	Total	82	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dalam tabel 4.4 disajikan bahwa usia responden terbanyak pada tingkat kategori 41-50 tahun yaitu 50% atau setara dengan 41 responden. Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pegawai perangkat desa merupakan masa dewasa madya di mana tingkat produktif sudah mulai menurun sehingga dinilai kurang produktif.

Tabel 4. 5 Karakteristik responden berdasarkan rentan waktu jabatan

Lama Jabatan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1-5 tahun	8	9.8%	9.8%	9.8%
	6-10 tahun	31	37.8%	37.8%	47.6%
	11-15 tahun	12	14.6%	14.6%	62.2%
	16-20 tahun	6	7.3%	7.3%	69.5%
	> 20 tahun	25	30.5%	30.5%	100.0%
	Total	82	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dalam data disajikan rentan waktu terlama menjabat ada pada kategori 6-10 tahun, hal ini menunjukkan bahwa lama waktu menjabat dari pegawai perangkat desa ialah 6-10 tahun dengan 31 responden.

Tabel 4. 6 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	2	2.4%	2.4%	2.4%
	SMA	43	52.4%	52.4%	54.9%
	Perguruan Tinggi	37	45.1%	45.1%	100.0%
	Total	82	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kriteria tingkat pendidikan dalam penelitian dikategorikan dalam 3 kategori yaitu, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Untuk tingkat kategori pendidikan perguruan tinggi 45% dengan jumlah 37 responden, SMA 52,4% dengan jumlah responden 43 responden dan SMP 2,4% dengan jumlah responden 2. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan paling banyak ialah SMA dengan 43 responden.

Tabel 4. 7 Jabatan

		Jabatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kepala Desa	19	23%	23%	23%
	Sekretaris Desa	21	26%	26%	49%
	Bendahara Desa	21	26%	26%	74%
	BPD	21	26%	26%	100%
	Total	82	100.0		

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan pada data tabel 4.7 yang disajikan dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ialah terdiri dari kepala desa, sekretaris, bendahara dan DPD (Badan Permusyawaratan Desa), dimana responden terbanyak ialah sekretaris, bendahara dan BPD yang memiliki presentase sama yaitu 26% dengan 21 responden.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif dari penelitian yang telah dilakukan menampilkan hasil deskripsi data yang merupakan tanggapan dari responden terhadap daftar pertanyaan

dalam kuesioner yang telah disebar. Tanggapan responden dideskripsikan dalam bentuk nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi yang diukur dengan skala Likert

Tabel 4. 8 Skala Likert

Jawaban	Nilai/Skor
STS	Sangat Tidak Setuju 1
TS	Tidak Setuju 2
KS	Kurang Setuju 3
S	Setuju 4
SS	Sangat Setuju 5

Berdasarkan Sugiyono (2019) maka dapat diperoleh nilai berikut :

$$\text{Interval} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Sangat rendah : 1,00 – 1,80

Rendah : 1,81 – 2,61

Sedang : 2,62 – 3,42

Tinggi : 3,43 – 4,23

Sangat tinggi : 4,24 – 5,00

Disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 9 Descriptif Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi	82	10	40	34.15	4.043
Transparansi	82	11	50	42.84	5.239
Kompetensi SDM	82	14	55	45.04	5.056
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	82	16	55	46.95	5.347
Valid N (listwise)	82				

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah data yang diolah ada 82 data dari responden, yang kemudian diolah oleh peneliti. Nilai maksimum untuk variabel digitalisasi ialah 10 minimum 34.15 dan standar deviation 4.043. variabel transparansi memiliki nilai maksimum 50, minimum 11 dan standar deviation 5.239. variabel kompetensi SDM dengan nilai maksimum 55, minimum 14 dan standar deviation 5.056. untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa nilai maksimum 55, minimum 16 serta standar deviation 5.347.

4.2.1.1 Deskripsi Variabel Digitalisasi

Variabel digitalisasi dalam penelitian ini diukur dengan 8 indikator. Hasil dari analisa kuesioner dari variabel digitalisasi dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 10 Deskripsi variabel digitalisasi

Statistics								
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
Mean	4.43	4.46	4.22	4.34	4.30	4.28	3.88	4.23
Keterangan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023

Dari tabel tersebut maka dapat dibuat kategori untuk indikator digitalisasi, dimana kategori tersebut dibagi menjadi 5 kategori yaitu STS, TS, KS, S, dan SS. Disajikan Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori indikator digitalisasi dapat dikategorikan sangat tinggi berdasarkan analisis diskriptif. Dimana nilai X1.1 4,43 dapat digolongkan sangat tinggi X1.2 4,46 digolongkan pula kedalam sangat tinggi X1.3 dengan nilai 4,22 digolongkan tinggi X1.4 dengan nilai 4,34 digolongkan sangat tinggi X1.5 digolongkan sangat tinggi X1.6 dengan nilai 4,28 digolongkan sangat tinggi X1.7 nilainya 3,88 digolongkan tinggi serta X1.8 dengan nilai 4,23 yang dapat digolongkan tinggi.

4.2.1.2 Deskripsi Variabel Tranparansi

Tabel 4. 12 Deskripsi variabel Kompetensi SDM

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa variabel kompetensi SDM dapat digolongkan tinggi, dengan X3.1 3,94 digolongkan tinggi, X3.2 digolongkan tinggi X3.3 dengan nilai 3,89 digolongkan tinggi X3.4 4,02 digolongkan tinggi X3.5 4,20 digolongkan tinggi X3.6 4,11 digolongkan tinggi X3.7 dengan nilai 4,13 digolongkan tinggi X3,8 dengan nilai 4,09 digolongkan tinggi X3.9 dengan nilai 4,06 digolongkan tinggi X3.10 dengan nilai 4,22 digolongkan tinggi dan X3.11 dengan nilai 4,49 digolongkan sangat tinggi.

4.2.1.4 Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Tabel 4. 13 Deskripsi variabel akuntabilitas dana desa

	Statistics										
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11
Mean	4,24	4,40	4,44	4,33	4,17	4,27	4,22	4,15	4,16	4,18	4,39
Keterangan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2023

Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Y yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat digolongkan sangat tinggi dengan nilai Y.1 4,24 sangat tinggi Y.2 4,40 dapat digolongkan sangat tinggi Y.3 4,44 digolongkan sangat tinggi Y.5 4,17 dapat digolongkan tinggi Y.6 4,27 digolongkan sangat tinggi Y.7 dengan nilai rata-rata 4,22 digolongkan tinggi Y.8 4,15 dapat digolongkan tinggi Y.9 4,16

digolongkan Tinggi Y.10 4,18 digolongkan tinggi dan Y.11 4,39 digolongkan sangat tinggi.

4.3 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1 Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas penelitian memakai *product moment*, berdasarkan pada tingkat signifikan kurang dari 0,05 atau r hitung $>$ r tabel (disajikan dalam r produk) sehingga validitas pertanyaan kuesioner dapat terpenuhi. Sajian tabel:

Tabel 4. 14 Uji Vaiditas Data

Variabel		Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	Digitalisasi	1	0,810	0,2172	Valid
		2	0,761		Valid
		3	0,832		Valid
		4	0,831		Valid
		5	0,782		Valid
		6	0,771		Valid
		7	0,543		Valid
		8	0,728		Valid
X2	Transparansi	1	0,778	0,2172	Valid
		2	0,764		Valid
		3	0,812		Valid
		4	0,772		Valid
		5	0,882		Valid
		6	0,834		Valid
		7	0,875		Valid
		8	0,863		Valid
		9	0,825		Valid
		10	0,851		Valid
X3	Kompetensi SDM	1	0,405	0,2172	Valid
		2	0,357		Valid
		3	0,289		Valid

		4	0,398		Valid
		5	0,600		Valid
		6	0,546		Valid
		7	0,647		Valid
		8	0,560		Valid
		9	0,514		Valid
		10	0,570		Valid
		11	0,727		Valid
Y	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1	0,376	0,2172	Valid
		2	0,637		Valid
		3	0,595		Valid
		4	0,599		Valid
		5	0,606		Valid
		6	0,712		Valid
		7	0,571		Valid
		8	0,556		Valid
		9	0,640		Valid
		10	0,575		Valid
		11	0,772		Valid

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 telah disajikan dapat dilihat uji validitas data dari variabel bebas yaitu digitalisasi, transparansi dan sumber daya manusia dengan variabel terikat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Disajikan bahwa nilai r hitung $>$ r tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam penelitian dinyatakan valid. Dengan jumlah $N = 82$ nilai r pada signifikan 0,05 adalah 0,2172.

4.3.1 Hasil Uji Realibilitas

Penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha 0,60. Jika Cronbach Alpha $>$ 0,60 maka dapat dikatakan reliable, dan jika Cronbach Alpha $<$ 0,60 maka dikatakan tidak reliable (Ghozali,2018). Disajikan tabel hasil uji reliabilitas penelitian:

Tabel 4. 15 Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Digitalisasi	0,882	Valid
Transparansi	0,948	Valid
Kompetensi SDM	0,912	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,940	Valid

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2023

Tabel diatas dapat diketahui hasil dari uji realibilitas dari tiap variabel. Variabel independen digitalisasi dengan nilai 0,882 sehingga dapat dikatakan reliable sudah memenuhi nilai $> 0,60$. Variabel independen transparansi dengan nilai 0,948 sudah $> 0,60$ sehingga sudah bisa dikatakan reliable. Variabel independe kompetensi sumber daya manusia 0,912 $> 0,60$ sehingga telah memenuhi reliable. Variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa 0,940 sehingga dapat dikatakan reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian dengan beberapa uji, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastistas.

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. 16 Hasil Uji Normatif

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Unstandardized Residual	
N	82

Normal Parameters^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,64675244
Most Extreme Differences	Absolute	0,085
	Positive	0,085
	Negative	-0,048
Test Statistic		0,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Uji normalitas bertujuan bagaimana variabel residu berdistribusi normal. Data distribusi normal jika hasil *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikan $> 0,05$ (Ghozali, 2018). Dalam data diatas uji normalitas pada model regresi dengan sample 82, menggunakan uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai tingkat signifikan 0,200 sehingga nilai tersebut $> 0,05$ dapat disimpulkan model regresi berdistribusi normal.

4.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ialah uji untuk mengetahui bagaimana model regresi dapat korelasi yang sempurna antar variabel. Pengujian dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Berikut disajikan tabel uji multikolinieritas:

Tabel 4. 17 Uji Multikolinieritas

Coefficients^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Contant)		

1	Digitalisasi	.317	3.151
	Transparansi	.216	4.630
	Kompetensi SDM	.306	3.273
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa			

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2023

Hasil dari uji diatas seluruh variabel independen (digitalisasi, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia) nilai tolerance $> 0,10$ serta nilai VIF < 10 , maka dapat ditarik simpulan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel serta dipergunakan dalam memperkirakan hal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastitas

Uji Heteroskedastitas menguji apakah terdapat ketidaksamaan variance dalam model regresi antara residu. Jika variance residual pengamatan satu ke yang lain tetap, maka dapat dikatakan homokedastitas, dan jika dalam variance tidak tetap maka dikatakan heteroskedastitas. Kriteria dalam pengujian glejser ialah nilai sig. $> 0,05$. Bila nilai sig. $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastitas dan bila nilai sig. $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastitas.

Tabel 4. 18 Uji Heteroskedastitas

NO	Keterangan	Sig
1	Digitalisasi	0,789
2	Transparansi	0,136
3	Kompetensi SDM	0,103

Sumber : Data Primer telah diolah, 2023

Berdasarkan sajian tabel diatas dikehui data dari keseluruhan variabel bernilai sig. > 0,05 sehingga hal ini dapat memperlihatkan bahwa regresi penelitian tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastitas. Model regresi dalam penelitian dapat dikatakan layak.

4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda akan menjelaskan bagaimana pengaruh *independent variable* dan *dependent variabel*. Hasil regresi dengan bantuan program SPSS dalam pengelolaan data. pengaruh digitalisasi, transparansi, kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 4. 19 Model Persamaan Regresi

Coefficients^a

<i>Model</i>		Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	Std. Error
1	(Constant)	4.962		2.816
	Digitalisasi	.210	.132	.159
	Transparansi	.449	.123	.440
	Kompetensi SDM	.346	.107	.327

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data Primer yang telah diolah, 2023

Dari tabel diatas 4.18 hasil pengelolaan data dalam model regresi linear ialah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 4,962 + 0,210X_1 + 0,449X_2 + 0,346X_3 + e$$

Keterangan :

X_1 = Digitalisasi

X_2 = Transparansi

X_3 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dijabarkan berikut:

Nilai konstanta sebesar 4,962 nilai positif sehingga dapat dimaknai digitalisasi, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia konstan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa bernilai positif. Nilai koefisien digitalisasi 0,210 sehingga bernilai positif dapat diartikan digitalisasi bernilai positif dan konstan. Nilai koefisien transparansi 0,449 bernilai positif dan diartikan konstan. Dan nilai koefisien kompetensi sumber daya manusia 0,346 bernilai positif dan memiliki nilai konstan sehingga semua variabel dapat diasumsikan tetap atau konstan.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dalam pengukuran model penjelasan variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi ($0 \leq R^2 \leq 1$) antara nol sampai satu. Bila nilai tinggi hingga mendekati satu maka model regresi dapat menjelaskan bahwa semakin kuat variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 ^a	.755	.746	2.697

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Digitalisasi,

Transparansi

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2023

Dalam tabel disajikan nilai adjusted R-squared bernilai 0,746 atau 74,6 % dapat diartikan bahwa variabel independen yang terdiri dari digitalisasi, transparansi dan kompetensi dapat memberikan penjelasan variabel dependen akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai 74,6% dengan nilai sisa 25,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel penelitian.

4.6.2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian F dipergunakan dalam menunjukkan bagaimana semua variabel bebas dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat (Ghozali,2018).

Tabel 4. 21 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1748.376	3	582.792	80.112	.000 ^b
	Residual	567.429	78	7.275		
	Total	2315.805	81			

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2023

Pengujian signifikansi Simultan ialah bila nilai Sig. $<0,05$ maka dapat dikatakan berpengaruh secara simultan sedangkan jika nilai Sig. $>0,05$ maka tidak ada pengaruh secara simultan. Pada tabel diatas disajikan nilai Sig. F 80,112 dengan tingkat signifikan 0,000 sehingga dapat diartikan nilai Sig. $< 0,05$ dan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

4.6.3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan guna menguji secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozila,2018).

Tabel 4. 22 Uji Parsial (t)

Coefficients ^a				
	B	Sig.	Hasil	Keterangan
1 (Constant)	4,962	0,082		
Digitalisasi	0,210	0,004	Positif Signifikan	Hipotesis Diterima
Transparansi	0,449	0,000	Positif Signifikan	Hipotesis Diterima
Kompetensi SDM	0,346	0,002	Positif Signifikan	Hipotesis Diterima

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2023

Pengujian parsial (t) dapat dikatakan berpengaruh apabila tingkat signifikan $< 0,05$ maka digolongkan berpengaruh dan bila tingkat signifikan $> 0,05$ maka dapat digolongkan tidak ada pengaruh. Berdasarkan data yang disajikan diatas variabel

Digitalisasi dengan nilai sig 0,004 merupakan $< 0,05$ dan koefisien b sebesar 0,210 sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis (H1) ialah **“diterima”**, yaitu Digitalisasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat dilihat dari tabel diatas tingkat signifikan 0,00 atau $< 0,05$ dan dibuktikan bahwa koefisien b sebesar 0,449 sehingga dapat disimpulkan bahwa (H2) **“diterima”**, yaitu Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dilihat dari tabel bahwa tingkat signifikan ialah 0,002 sehingga dari tabel dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai sig. $< 0,05$ dan koefisien b 0,346. Dapat disimpulkan bahwa (H3) **“diterima”** yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada pengujian yang telah disajikan diatas dengan variabel digitalisasi, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat diperoleh hasil pembahasan berikut ini:

4.7.1 Pengaruh Digitalisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pada penelitian yang telah diuji dapat diketahui bahwa digitalisasi berpengaruh secara signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana dapat diartikan bahwa salah satu faktor keberhasilan pemerintahan desa

dalam pengelolaan dana desa ialah dengan penguasaan digitalisasi, hasil pengujian menyatakan H1 diterima dengan tingkat sig.<0,05 dengan tingkat uji sig 0,004. Pengelolaan dana desa dengan penerapan digitalisasi melalui Siskeudes yang menjadi sistem administrasi pengelolaan yang digunakan dalam pemetintahan desa untuk memudahkan dalam pengelolaan dana desa dan meminimalisir kesalahan (Widyastuti, 2019). Rata rata pendidikan perangkat yaitu SMA menjadi faktor dalam indikator pendukung pemahaman bagi perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi pengelolaan serta penyajian informasi pengelolaan dana desa, namun didukung dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan juga mendorong aktifnya perangkat desa untuk terus berkembang serta menguasai tuntutan perkembangan teknologi yang ada. Pemanfaatan teknologi dengan sistem keuangan dirasa lebih efektif serta efisien dalam pengelolaan dana desa sehingga akuntabel (Pahlawan, 2020).

Digitalisasi telah diatur dalam PP No 56 Tahun 2005 yang menindaklanjuti dalam terselenggaranya proses pembangunan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berbasis teknologi dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Adanya siskeudes tentu mempermudah dalam pengelolaan dan desa serta dapat menghemat banyak waktu. Aparat merasa terbantu dan mudah dalam melaporkan SPJ kegiatan. Bukan hanya dari sisi aparat saja, masyarakat juga dimudahkan dalam mengawasi pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah maupun pusat juga dapat pula mengecek perkembangan tiap daerah berdasarkan pada laporan yang disajikan.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian (Hendaris, 2020) yang menyatakan digitalisasi berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, didukung dengan penelitian (Aziiz, 2019). Sedangkan menurut (Pahlawan, 2020) menyatakan keterbalikan dari penelitian Hendaris, yaitu digitalisasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa digitalisasi mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa lebih baik kedepannya.

4.7.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, variabel transparansi berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dapat diartikan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan (Tambuwan, 2018). Hasil pengujian menunjukkan nilai sig < 0,05 sehingga H2 diterima, dengan nilai sig 0,000. Dari hasil tersebut keterbukaan secara transparan dalam penyampaian akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah suatu indikator pendukung untuk menciptakan suatu informasi yang akuntabel. Penyampaian informasi sumber daya publik pada pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan Permendagri no 13 menyebutkan transparansi dana desa yang dilaksanakan diharapkan dapat menjamin masyarakat dalam mengakses semua informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan dan pengelolaan dana desa.

Tersedianya layanan secara online melalui *webset* resmi siskeudes menyajikan banyak laporan penyelenggaraan selama tahun berjalan sesuai dengan usulan pemerintah untuk pembangunan desa. Bukan hanya dapat diakses melalui web, laporan dapat pula diketahui masyarakat melalui papan pengumuman yang ada dikantor desa. Mudahnya akses transparan yang dilakukan pemerintah tentu saja akan meningkatkan tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Struktur pemerintahan yang baik dapat tercipta dengan adanya transparansi yang jelas tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini tentu akan meningkatkan *good governance*, dimana sebagai pemerintah melaksanakan kewajibannya mengelola keuangan dana desa dengan baik dan partisipan atau masyarakat mengawasi serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian terdahulu oleh Sukmawati, 2019 menyatakan bahwa ada pengaruh secara signifikan tranparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sejalan dengan penelitian Windyastuti, 2019. Sedangkan menurut Lawdewi, 2020 tidak ada pengaruh secara signifikan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan simpulan bahwa nilai sig < 0,05 yaitu 0,002, sehingga

H3 dapat dinyatakan diterima. Dari nilai tersebut kompetensi sdm merupakan indikator dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan sumber daya manusia yang memadai tentu akan menjamin kualitas hasil pelaporan informasi. Kompetensi meliputi kemampuan secara ahli dapat berupa sifat, sistem, sikap, pengetahuan maupun trampil (Puspa, 2020). Ada kegiatan pelatihan yang secara berkala dilaksanakan di kabupaten tentu akan meningkatkan kompetensi bagi aparatur desa. Efektifitas akan menunjang kompetensi sehingga pemahaman dalam pengelolaan akan tercipta (Ardianti, 2020).

Teori keagenan muncul ketika tujuan principal dan agen bertentangan (conflict of interest) dan pembagian resiko akan muncul ketika sikap principal terhadap resiko berbeda dengan sikap agen, memunculkan kedua tindakan yang berbeda (Sudarmanto 2021). Dikenal dalam teori agensi, agen memberikan seluruh kewenangan pada principal untuk melaksanakan amanah. Pemerintah desa yang bertindak sebagai principal dan agen merupakan masyarakat. Sehingga dalam kompetensi sumber daya manusia, bila perangkat desa memiliki kompetensi yang memadai serta berkualitas tentu akan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana desa sesuai amanah yang diberikan oleh agen atau masyarakat. Peningkatan kompetensi untuk menunjang kinerja dilakukan setiap bulan oleh pihak kecamatan sehingga kendala yang dialami oleh aparat desa dapat terselesaikan. Adanya evaluasi tentu juga menjadi patokan dalam peningkatan kinerja pemerintahan desa.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yaitu Ardianti, 2017 bahwa ada pengaruh secara signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sejalan dengan perlu adanya peningkatan kompetensi (Suryani, 2021). Berbeda dengan penelitian oleh Widyatama, 2017 dan didukung tarjo, 2019 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari sini dapat diambil kesimpulan dari penelitian bahwa ada pengaruh secara signifikan kompetensi sumber daya manusia pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan diiringi peningkatan kompetensi.



BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian untuk menemukan sebuah bukti empiris digitalisasi, transparansi dan kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan metode analisa SPSS (*Software Statistic Product and Service Solutions*) melibatkan 82 sample aparatur desa terkait. Motode analisa yang digunakan dengan analisa regresi linier berganda, sehingga dari penelitian dapat diambil kesimpulan berikut :

- a. Digitalisasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan pemahaman yang memadai tentang teknologi informasi bagi aparat desa dapat mengelola serta menyajikan informasi laporan secara akuntabel dan meningkatkan tingkat efektifitas serta efisiensi.
- b. Transparansi berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Trasnparansi atau dapat diartikan keterbukaan merupakan faktor yang mendukung suatu informasi disampaikan apa adanya dan penghindaraan adanya penyelewengan. Dengan tingginya tingkat transparansi dari setiap penyampaian informasi keuangan desa maka semakin akuntabel laporan yang disajikan.
- c. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi atau keahlian merupakan faktor

pendukung penting dalam pengelolaan dana desa. Tingkat pendidikan serta pelatihan yang dilakukan guna mendukung kompetensi setiap aparat desa.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian yang ada yaitu peneliti secara sadar dalam penelitian mungkin ada persepsi yang berbeda dengan pernyataan dalam penelitian. Metode pengambilan data dengan kuesioner yang dirasa masih perlu untuk penjelasan secara rinci pada responden maksud dari pernyataan penelitian sehingga memakan waktu lebih lama. Ada beberapa respon aparat yang enggan untuk mengisi kuesioner, dikarenakan ketakutan aparat desa dengan adanya isu-isu di media juga menyulitkan peneliti dalam pengambilan sampel.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran berikut ini:

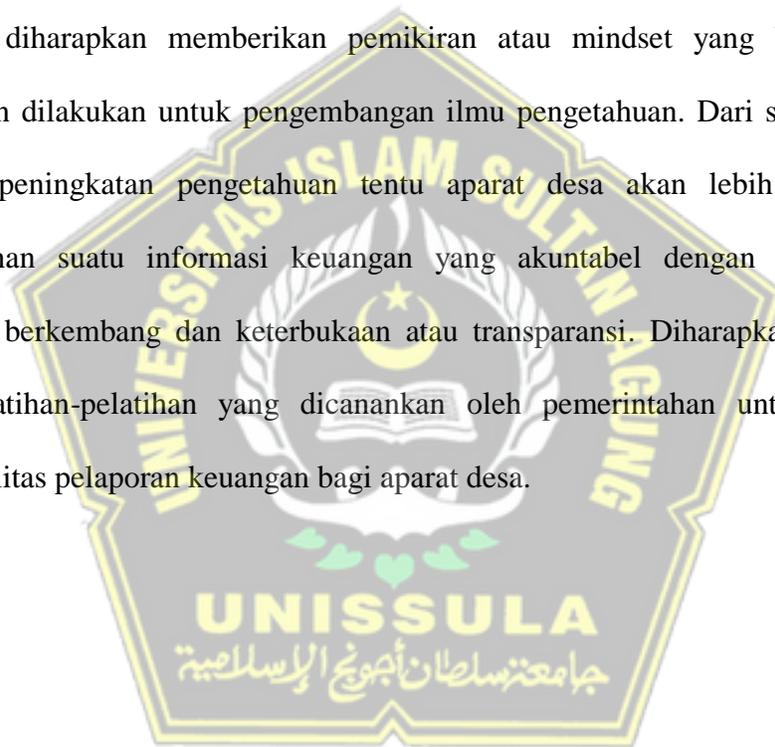
5.3.1 Bagi Akademik

Hasil penelitian dengan *Adj. R-Square* 86% dengan nilai kategori tinggi sehingga masih ada 14% variabel yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Harapan peneliti kedepannya dapat melaksanakan penelitian dengan tempat berbeda sehingga menambah referensi ilmu. Peneliti dalam keberlanjutan diharapkan dapat menggunakan metode pengambilan data dengan

berbeda sehingga dapat meningkatkan kualitas serta kesesuaian yang ada dilapangan, baik dari segi pernyataan maupun kenyataan yang ada.

5.3.2 Bagi Aparat Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisa yang telah terlaksana, aparat pemetintah desa diharapkan meningkatkan tingkat kompetensi serta pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki diharapkan memberikan pemikiran atau mindset yang berbeda bahwa penelitian dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dari segi ketrampilan dengan peningkatan pengetahuan tentu aparat desa akan lebih paham dalam penyusunan suatu informasi keuangan yang akuntabel dengan teknologi yang semakin berkembang dan keterbukaan atau transparansi. Diharapkan lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang dicanankan oleh pemerintahan untuk mendukung akuntabilitas pelaporan keuangan bagi aparat desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Al, Sugiarti: et. 2017. “Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice* (3): 580–90. <https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?page=3&id=6015144&view=documents>.
- Ardianingsih, Arum et al. 2018. “UNTUK AKUNTABILITAS DANA DESA.” : 21–30.
- Ardianti. 2017. “I Wayan Ramantha 2 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia.” : 1041–54.
- Arfiansyah, Mufti Arief. 2020. “Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 3(1).
- Ayem, Sri, and Enti Fitriyaningsih. 2022. “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* ISSN: 24(2): 446–63.
- Aziiz, Muhammad Nur. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa.” *Jurnal Akuntansi Aktual* 6(2): 334–44.
- BPK. 2010. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).” <http://www.dikti.go.id/files/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>.
- Budiana. 2019. “The Effect of Village Device Competencies and Internal Control System on Accountability of Village Management.” *Scientific Research Journal* VII(I): 10–20.
- Dewi. 2019. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *E-Jurnal Akuntansi* 26: 1269.
- Dini, Vika Azkia. 2022. “Sepanjang 2021 Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) Korupsi Tertinggi Pada Sektor Anggaran Dana Desa Sebesar Rp. 233 Miliar Dengan 154 Kasus Yang Terjadi.” *19 April 2022*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>.
- Emerson, Peter. 2022. “AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE.”

Humanistic Sciences) 9(1): 132–55. www.cceol.com.

- Fabiana M. 2019a. “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.” (2).
- . 2019b. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.” (1).
- Fauzani. 2018. “Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.” *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 8(1): 5.
- Hardiningsih, Pancawati, Udin Udin, Greg N. Masdjojo, and Ceacilia Srimindarti. 2020. “Does Competency, Commitment, and Internal Control Influence Accountability?” *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7(4): 223–33.
- Haryanto. 2003. “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2003.” *Demographic Research* 49(0): 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- Haryati. 2017. “PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, JUMLAH DEWAN DIREKSI, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, PERSENTASE SAHAM PUBLIK, KOMITE AUDIT, DAN LEVERAGE TERHADAP EARNING MANAGEMENT.” *Молекулярная Биология* (3): 473–82.
- Hasriani, Faiz Fakhruddin, Inriani, and Jusniaty. 2016. “Pelaksanaan Good Governance Di Desa Gantarang.” *PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0”*: 1–22. <http://research-report.umm.ac.id/index.php/PSIP/article/view/3521/3441>.
- Hendaris, Budi, and Romli Romli. 2021. “Effect of Village Apparatus Performance, Internal Control, Information Technology Utilization on Village Fund Accountability and Implications on Quality Village Financial Report.” *Dinasti International Journal of Management Science* 2(4): 569–80.
- Hendaris, R. Budi. 2020. “ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUNDS MANAGEMENT R.” 1(3): 400–411.
- Heni Risnawati, Sukma Wijayanti, and , Sri Retnoningsih. 2022. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.” *Jurnal*

- E-Bis (Ekonomi-Bisnis)* 6(1): 199–211.
- Imam, Ghazali. 2018. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS.” *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*: 98–99.
- Indrawa, Sri Mulyani. 2017. “Prospek Perekonomian Indonesia 2017.” *Kementrian Perdagangan Republik Indonesia*: 1–20.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono).” *Assets* 1: 29–46.
- Indrianto. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” *Peraturan.Bpk.Go.Id* 51(1): 51.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.
- Kristiyanti, L. M.S. 2021. “The Implementation of Good Corporate Governance, Village Apparatus Performance, Organizational Culture, Andits Effects against Village Fund Management Accountability (Case Study of Tulung District, Klaten Regency).” *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* 25(1): 1985–96.
- Ladewi, Yuhanis et al. 2020. “The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management.” *The International Journal of Accounting and Business Society* 28(2): 45–64.
- Mardiasmo2. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Naryanti, Dina. 2022. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4(11): 5193–5201.
- Ningsih, Winda, and Eriana Kartadjumena. 2022. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparatur Desa Pada Desa Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.” *Jurnal Wacana Ekonomi* 21(1): 001.
- Nisya, F K. 2017. “DETERMINAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Mayong Dan Kecamatan Kedung” <http://lib.unnes.ac.id/30794/>.

- NURDIN, YASMI, and Irwan Wijaya. 2019. "PENGARUH KOMPETENSI AKUNTANSI APARAT PENGELOLA DANA DESA DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)." *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal* 1(1).
- Pahlawan, Enggar Wahyuning, Anita Wijayanti, and Suhendro Suhendro. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Indonesia Accounting Journal* 2(2): 162.
- Peraturan Pemerintah. 2014. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan* (14): 1–20. www.bphn.go.id.
- Permatasari, Elysabeth. 2022. "Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik* 1(1): 25–43.
- Purba, Hasian, Elok Kurniawati, and Tries Handriman Jamain. 2020. "Analysis of Factors Affecting The Accountability of Village Fund Allocation Management (Case Study at the Village Office in Pangandaran District Pangandaran Regency)." *International Journal of Economics and Management Studies* 7(3): 179–88.
- Puspa. 2020. "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 20(2): 281–98.
- Rani. 2020. "STATISTIK Indeks Perilaku Anti Korupsi." (76): 2.
- Risya Umami, Idang Nurodin. 2017. "Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto." *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi* 6(11): 74–80.
- Sahala Purba. 2022. "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa." *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1(1): 122–29.
- Sudarmanto, Eko. 2021. *Good Corporate Governance*.
- Sugiyono. 2018. "Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methoders)." *Alfabeta* 28: 624 hal.

- Sukmawati, Fitri, and Alfi Nurfitriani. 2019. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)." *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM* 2(1): 52–66.
- Suparyanto. 2020. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA." *Suparyanto* 5(3): 248–53.
- Suryani, Ni Made Herkulanus Bambang Suprasto. 2021. "Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." : 2011.
- Sweetenia, Amanda Mutiara, Eka Pinditya Ayu Caesari, Arum Frida Aprillia, and Anissa Hakim Purwantini. 2019. "Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa." *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* 17(1): 44–56.
- Tambuwun. 2018. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 14(1): 76–84.
- Tarjo. 2019. "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo) Tarjo 1 1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio Muara Bun." *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram* 5(2): 1/16. <http://ejournalstiamataram.ac.id>.
- Umaira. 2019. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4(3): 471–81.
- Widyatama. 2017. "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)." 02(02): 1–20.
- Windyastuti, Lita Yulita Fitriyani, Marita, and Mufida Nur Afifah. 2019. "Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen , Blora , Central Java." *Proceeding UII-ICABE*: 177–84.
- Yulianti. 2019. "Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi,

Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018).” *Jurnal Ekonomi* 27(4): 386–98.

Zubaidi, Nabila. 2022. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Wilayah Kecamatan Karangrejo.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5(1): 183–94.

